

V. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025-2029





**WALI KOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 12 TAHUN 2025**

**TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang** : a. bahwa rencana strategis perangkat daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakat;
- b. bahwa rencana strategis perangkat daerah menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam rangka pelaksanaan urusan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan ;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2024 tentang Kota Payakumbuh di Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6977);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025 – 2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Payakumbuh.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Payakumbuh.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang membantu kepala Daerah dalam perencanaan pembangunan.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029, selanjutnya disingkat RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun berpedoman kepada RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk:

- a. merumuskan gambaran pelayanan yang akan diselenggarakan Perangkat Daerah;
- b. merumuskan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, strategi dan arah kebijakan serta rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran pembangunan Daerah; dan
- c. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika yang terdiri atas:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
 - c. tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
 - d. program, kegiatan, sub kegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - e. penutup
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

- d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Dinas Sosial;
- h. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
- i. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- j. Dinas Ketahanan Pangan;
- k. Dinas Lingkungan Hidup;
- l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- m. Dinas Perhubungan;
- n. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- o. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- q. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
- r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- s. Dinas Pertanian;
- t. Sekretariat Daerah;
- u. Sekretariat DPRD;
- v. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- w. Badan Keuangan Daerah;
- x. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- y. Inspektorat;
- z. Kecamatan Payakumbuh Utara;
- aa. Kecamatan Payakumbuh Barat;
- bb. Kecamatan Payakumbuh Timur;
- cc. Kecamatan Payakumbuh Selatan;
- dd. kecamatan Lamposi Tigo Nagori; dan
- ee. Kantor Kesbangpol.

- (3) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi rencana strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang – undangan.

Pasal 6


Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dilakukan mengikuti perubahan RPJMD Tahun 2025-2029 yang ditetapkan dengan peraturan Wali Kota.

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 4 September 2025
WALI KOTA PAYAKUMBUH,



ZULMAETA

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 4 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,



RIDA ANANDA
BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025 NOMOR.12

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Payakumbuh Tahun 2025 - 2029 ini dapat disusun dengan baik. Renstra merupakan dokumen perencanaan strategis yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan indikator kinerja yang akan menjadi pedoman bagi Bappeda dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi selama periode lima tahun ke depan.

Penyusunan Renstra ini berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, serta selaras dengan arah pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh, dan kebijakan pembangunan nasional. Dokumen ini juga disusun dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan strategis, tantangan pembangunan, serta kebutuhan untuk memperkuat sinergi perencanaan antara pemerintah daerah, provinsi, dan nasional.

Dokumen Renstra Bappeda ini dapat menjadi acuan dalam mengarahkan pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan serta mendorong peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan memperkuat akuntabilitas kinerja Bappeda. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak dalam mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan

Payakumbuh, 4 September 2025
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Payakumbuh



Drs. SYAFWAL, M.M
NIP. 196901161990091001

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	7
	1.4 Sistematika Penulisan	8
	1.5 Penutup	9
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	8
	2.1 Gambaran umum pelayanan perangkat daerah	10
	2.2 Permasalahan dan isu strategis	31
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	41
	3.1 Tujuan Renstra perangkat daerah Tahun 2025 - 2029	41
	3.2 Sasaran Renstra perangkat daerah Tahun 2025 - 2029	41
	3.3 Strategi perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah Tahun 2025 - 2029	44
	3.4 Arah kebijakan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah Tahun 2025 - 2029	45
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN	
	4.1 Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan	49
BAB V	PENUTUP	75

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Data pegawai bappeda tahun 2025	11
Tabel 2.2	Data peralatan dan mesin	13
Tabel 2.3	Pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah tahun 2023 – 2026	13
Tabel 2.4	Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan perangkat daerah tahun 2023 - 2026	20
Tabel 3.1	Tujuan, Sasaran, Renstra perangkat daerah Tahun 2025 - 2029	42
Tabel 3.2	Penahapan renstra perangkat daerah kota payakumbuh Tahun 2025-2029	44
Tabel 3.3	Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan	46
Tabel 3.4	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029	47
Tabel 4.1	Rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan tahun 2025 - 2029	50
Tabel 4.2	Program prioritas dalam mendukung program prioritas Pembangunan daerah	68
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Utama Bappeda tahun 2025 - 2029	73
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Kunci Bappeda tahun 2025 - 2029	73
Tabel 4.5	Indikator lainnya Bappeda tahun 2025 - 2029	74

MANAJEMEN RESIKO

METADATA TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

POHON KINERJA

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tambahkan Inmendagri Nomor 2 tahun 2025(apa penjelasan aturan ini)

Penyusunan Renstra juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah, di mana Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan RPJPD, RPJMD, serta dokumen perencanaan nasional dan provinsi. Dengan demikian, keberadaan Renstra menjadi instrumen penting untuk menjamin keterpaduan perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

Renstra Perangkat Daerah berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan selama periode 5 (lima) tahun. Dokumen ini menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif, terarah, terpadu, dan berkesinambungan.

Penyusunan Rencana Strategis Bappeda Kota Payakumbuh untuk periode 2025-2029 merupakan langkah strategis yang tak terpisahkan dari upaya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Renstra ini disusun sebagai panduan utama dalam menjawab tantangan dan peluang pembangunan, serta mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Renstra Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 juga bertujuan untuk memperkuat peran Bappeda sebagai perangkat daerah perencana yang adaptif, inovatif, dan kolaboratif. Penyusunan dokumen ini dilakukan melalui pendekatan partisipatif, melibatkan berbagai pihak seperti Perangkat Daerah, akademisi,

masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, guna memastikan bahwa rencana yang dirumuskan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi seluruh lapisan masyarakat.

Renstra Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029, diharapkan dapat menciptakan sinergi yang kuat antar berbagai pihak dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, inovatif, dan berkeadilan, sekaligus mendorong percepatan pencapaian target pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan untuk penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2024 tentang Kota Payakumbuh di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2024 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6977);
- 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 - 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistim Informasi Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indoensia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 220);
19. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 195);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032; (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 79);
21. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 45);
23. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 15);
24. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota

Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);

25. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2024 Nomor 6. Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 68);
26. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 71);
27. Peraturan Wali Kota Payakumbuh Nomor 73 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
28. Peraturan Wali Kota Payakumbuh Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025;
29. Peraturan Wali Kota Payakumbuh Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025 Nomor 9).

Selain aturan hukum di atas, dalam penyusunan dokumen ini juga berpedoman pada, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun

2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud

Penyusunan Renstra Bappeda Kota Payakumbuh 2025-2029 dimaksudkan untuk menjadi pedoman strategis yang komprehensif dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan daerah dan Bappeda juga bertanggung jawab dalam menghasilkan berbagai kajian dan inovasi berbasis riset yang menjadi dasar pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan daerah selama periode lima tahun ke depan. Dokumen ini bertujuan untuk mengarahkan langkah-langkah pembangunan agar selaras dengan visi, misi, dan kebijakan pemerintah daerah yang telah ditetapkan. Selain itu, Renstra ini juga berfungsi sebagai acuan untuk memastikan konsistensi antara program prioritas di tingkat daerah dengan sasaran pembangunan nasional.

Tujuan

1. Memastikan Efektivitas Perencanaan Mengoptimalkan peran Bappeda dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan daerah
2. Meningkatkan Koordinasi dan Sinergi Menciptakan keselarasan antara berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat daerah, nasional, maupun masyarakat, untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.
3. Menyediakan Kerangka Kerja yang Jelas Menyusun program dan indikator kinerja yang terukur, guna memastikan keberhasilan implementasi berbagai kebijakan pembangunan
4. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Menjadi dokumen publik yang dapat digunakan untuk mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan kinerja pembangunan daerah.
5. Mengakomodasi Isu Strategis Menjawab tantangan global dan lokal, seperti perubahan iklim, teknologi, serta inklusi sosial-ekonomi, agar pembangunan daerah tetap relevan dan berdaya saing.

Renstra Bappeda Kota Payakumbuh 2025-2029 diharapkan dapat menjadi landasan kuat dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat peran strategis Bappeda dalam menggerakkan roda pembangunan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Renstra Bappeda Kota Payakumbuh tahun 2025-2029 dilakukan dengan mematuhi pedoman yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Prosedur penyusunan mengikuti sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BAPPEDA

- 2.1 Gambaran Pelayanan Bappeda
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Bappeda

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan Renstra Bappeda Tahun 2025 – 2029
- 3.2 Sasaran Renstra Bappeda Tahun 2025 – 2029
- 3.3 Strategi Bappeda dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Bappeda Tahun 2025 – 2029
- 3.4 Arah Kebijakan Bappeda dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Bappeda Tahun 2025 – 2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Uraian Program
- 4.2 Uraian Kegiatan
- 4.3 Uraian Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif
- 4.4 Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
- 4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Bappeda Tahun 2025–2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda
- 4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025–2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

a. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

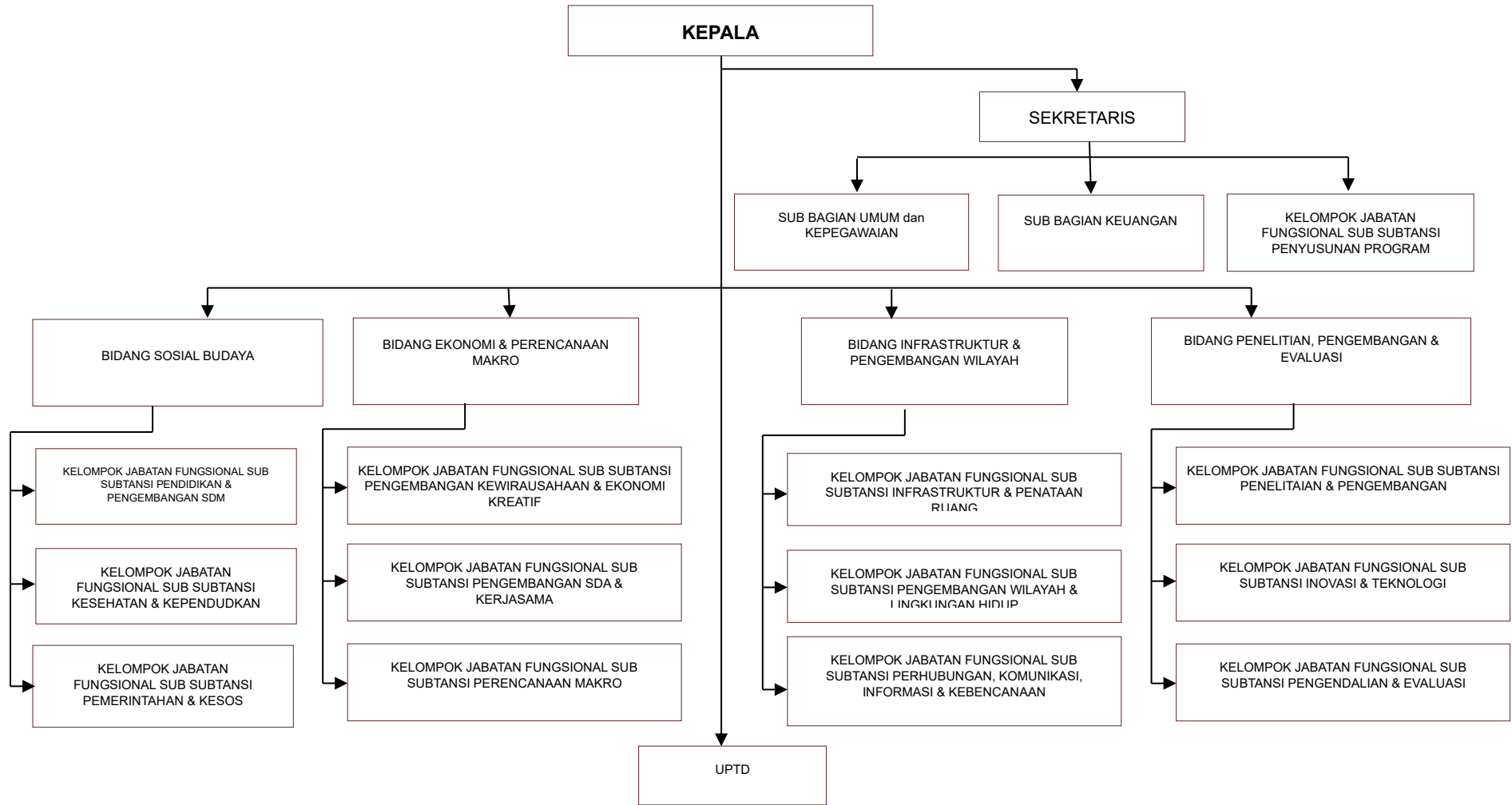
Berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 63 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, diuraikan Kedudukan, Tugas dan Fungsi Bappeda Kota Payakumbuh. Bappeda Kota Payakumbuh merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Bappeda Kota Payakumbuh membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah. Selain itu Bappeda dalam melaksanakan tugas juga menyelenggarakan fungsi yaitu:

- a. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah;
- b. pelaksana kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya

Susunan Organisasi Bappeda Kota Payakumbuh, terdiri dari:

- a. Badan;
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Penyusunan Program.
- c. Bidang Sosial Budaya, membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Kesehatan dan Kependudukan;

3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial.
- d. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahi:
1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Infrastruktur dan Penataan Ruang;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Perhubungan, Komunikasi Informatika dan Kebencanaan.
- e. Bidang Ekonomi dan Perencanaan, membawahi:
1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengembangan Sumber Daya Alam dan Kerjasama;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengembangan Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Perencanaan Makro;
- f. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi, membawahi:
1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Penelitian dan Pengembangan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengendalian dan Evaluasi;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Inovasi dan Teknologi.
- g. UPTD



Gambar 1.1
Struktur Organisasi Bappeda Kota Payakumbuh

b. Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda didukung oleh sumber daya aparatur yang terdiri dari 46 orang

TABEL 2.1
Data Pegawai Bappeda Tahun 2025

Uraian	Jumlah
Eselon II b	1
Eselon III a	1
Eselon III b	4
Eselon IV a	2
Fungsional Perencana Ahli Madya	3
Fungsional Perencana Ahli Muda	15
Fungsional Perencana Ahli Pertama	2
Fungsional Peneliti Muda	1
Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Muda	2
CPNS	2
P3K	4
Fungsional Umum	4
Total	41

Sumber : Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2025

Tabel 2.2
Data Peralatan dan Mesin

No	Jenis Barang	Jumlah
1	Portable Generating Set	1
2	Transportable Water Pump	1
3	Mini Bus	6
4	Sepeda Motor	25
5	Gerobak Dorong	1
6	Penyemprot Mesin (Power Sprayer)	1
7	Alat Penyiangan Tanaman	1
8	Mesin Ketik Manual Standard (14-	1
9	Mesin Absen (Time Recorder)	1

No	Jenis Barang	Jumlah
10	Lemari Besi/Metal	6
11	Filing Cabinet Besi	9
12	Brandkas	1
13	Rotary Filling	1
14	Lemari Sorok	2
15	Lemari Kaca	31
16	Papan Visual/Papan Nama	2
17	Alat Penghancur Kertas	1
18	Papan Nama Instansi	1
19	Papan Pengumuman	2
20	White Board	1
21	Laser Pointer	2
22	LCD Projector/Infocus	7
23	Alat Penghancur Jarum	1
24	Lemari Kayu	7
25	Meja Kerja Besi/Metal	1
26	Meja Rapat	2
27	Kursi Tamu	1
28	Meja Komputer	3
29	Meja 1/2 Biro	22
30	Sofa	3
31	Mesin Penghisap Debu/Vacuum	2
32	Lemari Es	1
33	A.C. Window	10
34	A.C. Split	9
35	Exhaust Fan	4
36	Televisi	5
37	Wireless	2
38	Microphone Table Stand	1
39	Unit Power Supply	18
40	Stabilisator	2
41	Camera Video	1

No	Jenis Barang	Jumlah
42	Camera film	1
43	Tangga Aluminium	1
44	Dispenser	1
45	DVD Player	1
46	Karpet	4
47	Alat Pemadam/Portable	1
48	Mainframe (Komputer Jaringan)	3
49	Mini Komputer	1
50	P.C Unit	43
51	Lap Top	27
52	Note Book	16
53	Hard Disk	4
54	CPU (Peralatan Mini Komputer)	1
55	Disk Pack (Peralatan Mini Komputer)	2
56	Plotter (Peralatan Mini Komputer)	1
57	Monitor	2
58	Printer (Peralatan Personal Komputer)	42
59	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1
60	External	3
61	External CD/ DVD Drive (ROM)	1
62	Server	2
63	Modem	2
64	Jaringan Satpas	3
65	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1
66	Meja Kerja Pejabat Eselon III	10
67	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	12
68	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	3
69	Meja Rapat Pejabat Eselon II	3
70	Meja Rapat Pejabat Eselon III	4
71	Meja Tamu Ruang Tunggu Pejabat	1
72	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	7
73	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5

No	Jenis Barang	Jumlah
74	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	21
75	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	3
76	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	30
77	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	2
78	Kursi Tamu di Ruangan Tunggu	2
79	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	3
80	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2
81	Buffet Kayu	2
82	Microphone/Wireless MIC	1
83	Camera Electronic	2
84	Tripod Camera	1
85	Lensa Kamera	1
86	Layar Film/Projector	4
87	Pesawat Telephone	1
88	Facsimile	2
Total		460

Sumber: Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2025

c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menganalisa kinerja pelayanan Bappeda didasarkan pada Indikator Kinerja Kunci (IKK) atau Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan sasaran dan target yang telah ditetapkan tahun 2020 - 2024

**TABEL 2.3
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BAPPEDA TAHUN 2020-2024
(TABEL T-C.23 LAMPIRAN PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017)**

NO	Indikator kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Nilai Evaluasi AKIP Bappeda oleh Inspektorat				A	A	A	A	A	AA	AA	A	A	A	120	120	100	100,00	100,00
2	Indeks kualitas perencanaan							90,00	90,50				79,97	87,47				88,86	96,65
3	Kategori tingkat inovasi daerah							Inovatif	Inovatif				Inovatif	Inovatif				100,00	100,00
4	Persentase Pagu Belanja dalam RKPD yang mengakomodir usulan masyarakat				17,00%	17,50%	18,00%			17,14%					100,824				
5	Persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPJMD				97,04%	98,20%	98,80%			100%					103,05				
6	Nilai evaluasi AKIP komponen perencanaan					28	29				24,04	24,19				85,86	83,41		
7	Persentase Indikator RPJMD yang tercapai atau melebihi target				91,67%	93,39%	97,22%			89,53%									

NO	Indikator kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8	Nilai evaluasi AKIP komponen capaian kinerja					18	20				11,51	15				63,94	75,00		
9	Persentase hasil kelitbangan yang dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan				85,00%	90,00%	95,00%			84,62%									
10	Indeks Inovasi Daerah					8200	8500				14087	9582				171,79	115,45		

Sumber: Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2025

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memiliki peran strategis sebagai penggerak utama dalam perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan yang berkesinambungan dan inklusif.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bappeda terus berupaya meningkatkan kinerja pelayanannya. Pelayanan ini diberikan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan adaptabilitas terhadap dinamika kebutuhan perencanaan, penelitian dan pengembangan, Adapun kinerja pelayanan bappeda yaitu:

1. Perencanaan Berkualitas: Penyusunan dokumen perencanaan strategis seperti RPJPD, RPJMD, RKPD, PRKPD dan kajian mendalam yang menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan koordinasi dan sinergi lintas sektoral dengan pemerintah propinsi dan pusat, DPRD, Perangkat Daerah dan masyarakat, yang menghasilkan kebijakan-kebijakan pembangunan yang lebih responsif dan adaptif serta penguatan monitoring dan evaluasi pengendalian pembangunan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pencapaian target-target pembangunan.
2. Inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah: Mendorong inovasi dalam kebijakan publik yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan, pengembangan ekonomi kreatif, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

TABEL 2.4
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020-2024

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke					Rata - Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19	20
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota		5.561.369.913	6.680.423.685	6.403.568.995	6.293.222.667	-	5.136.028.166	6.210.277.465	5.940.378.271	5.958.620.654		92,43	92,96	92,77	94,68	1.573.305.667	1.489.655.164
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pemerintah		23.837.540	145.820.230	106.405.330	68.925.450		22.258.730	141.619.500	104.357.950	68.078.375		93,38	97,12	98,08	98,77	17.231.363	17.019.594
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4.507.229.581	4.703.851.233	4.830.276.443	4.955.650.885		4.233.669.152	4.393.455.166	4.444.094.049	4.668.717.331		93,93	93,40	92,00	94,21	1.238.912.721	1.167.179.333
Kegiatan Administrasi Kepegawaia Perangkat Daerah		-	66.859.400	23.909.400	-		-	50.381.250	23.909.400	-			75,35	100,00		-	-
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		517.516.890	1.108.896.450	769.198.850	696.778.050		421.650.976	1.052.330.136	752.622.979	683.616.350		82,26	94,90	97,85	98,11	174.194.513	170.904.088
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	71.442.530	247.641.000	28.700.000		-	64.450.000	226.004.000	28.400.400			90,21	91,26	98,96	7.175.000	7.100.100
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		274.964.842	171.700.842	171.956.392	181.342.282		248.154.654	164.202.703	168.045.593	172.270.046		90,25	95,63	97,73	95,00	45.335.571	43.067.512
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		237.821.060	411.853.000	254.181.580	361.826.000		210.394.654	343.838.710	221.344.300	337.538.152		88,47	83,49	87,08	93,29	90.456.500	84.384.538

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke					Rata - Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19	20
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	-	678.010.810	1.108.990.940	1.140.066.590	920.642.350	-	648.227.630	1.088.619.924	1.070.535.868	815.704.205	-	95,61	98,16	93,90	88,60	230.160.588	203.926.051
Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	-	407.813.060	817.489.630	878.659.770	795.496.250	-	396.590.946	807.848.300	834.531.700	697.547.200	-	97,25	98,82	94,98	87,69	198.874.063	174.386.800
Kegiatan Analisa Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	254.780.240	249.471.290	17.705.300	13.909.900	-	236.444.694	241.293.454	17.267.590	13.872.745	-	92,80	96,72	97,53	99,73	3.477.475	3.468.186
Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	15.417.510	42.030.020	96.322.250	24.586.700	-	15.191.990	39.478.170	84.964.730	23.906.660	-	98,54	93,93	88,21	97,23	6.146.675	5.976.665
Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	-	-	-	147.379.270	86.649.500	-	-	-	133.771.848	80.377.600	-	-	-	90,77	92,76	21.662.375	20.094.400
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	-	191.665.240	712.550.370	516.034.120	581.264.150	-	186.206.100	695.569.404	495.321.358	521.975.518	-	97,15	97,62	95,99	89,80	145.316.038	130.493.880
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	162.876.370	393.354.020	279.628.400	205.847.100	-	158.891.050	389.848.864	276.114.804	195.718.987	-	97,55	99,11	98,74	95,08	51.461.775	48.929.747

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke					Rata - Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19	20
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA Sumber Daya Alam)	-	11.912.860	11.181.820	15.642.000	162.518.500	-	11.301.200	10.832.650	15.230.150	142.502.100	-	94,87	96,88	97,37	87,68	40.629.625	35.625.525
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	16.876.010	308.014.530	220.763.720	212.898.550	-	16.013.850	294.887.890	203.976.404	183.754.431	-	94,89	95,74	92,40	86,31	53.224.638	45.938.608
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	230.335.120	492.724.390	479.539.190	304.482.450	-	222.810.630	469.098.250	457.293.001	303.148.110	-	96,73	95,20	95,36	99,56	76.120.613	75.787.028
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	-	14.205.620	79.749.900	104.655.850	86.499.150	-	12.755.420	74.651.560	84.694.960	86.295.535	-	89,79	93,61	80,93	99,76	21.624.788	21.573.884
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-	38.524.560	92.956.260	128.482.450	107.479.600	-	33.150.060	87.084.640	127.043.585	107.319.940	-	86,05	93,68	98,88	99,85	26.869.900	26.829.985
Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-	177.604.940	320.018.230	246.400.890	110.503.700	-	176.905.150	307.362.050	245.554.456	109.532.635	-	99,61	96,05	99,66	99,12	27.625.925	27.383.159
Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	9.563.025	-	-	-	-	9.558.165	-	-	-	-	9,99	-	-	-	-	-	-
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik	9.563.025	-	-	-	-	9.558.165	-	-	-	-	99,95	-	-	-	-	-	-
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	892.032.505	-	-	-	-	876.718.821	-	-	-	-	98,28	-	-	-	-	-	-

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke					Rata - Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19	20
Kegiatan Penyusunan rancangan RKPD	280.436.750	-	-	-	-	279.729.510	-	-	-	-	99,75	-	-	-	-	-	-
Kegiatan Penyelenggaraan musrenbag RKPD	17.164.010	-	-	-	-	17.162.920	-	-	-	-	99,99	-	-	-	-	-	-
Kegiatan Penetapan RKPD	22.790.850	-	-	-	-	22.474.250	-	-	-	-	98,61	-	-	-	-	-	-
Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	9.796.350	-	-	-	-	9.777.195	-	-	-	-	99,80	-	-	-	-	-	-
Kegiatan Perubahan RKPD	188.634.950	-	-	-	-	187.258.150	-	-	-	-	99,27	-	-	-	-	-	-
Kegiatan Keberlanjutan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	142.685.775	-	-	-	-	141.297.926	-	-	-	-	99,03	-	-	-	-	-	-
Kegiatan Perubahan RPJMD	230.523.820	-	-	-	-	219.018.870	-	-	-	-	95,01	-	-	-	-	-	-
Program Perencanaan Sosial dan Budaya	23.261.620	-	-	-	-	23.172.780	-	-	-	-	99,62	-	-	-	-	-	-
Kegiatan Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	12.289.290	-	-	-	-	12.264.390	-	-	-	-	99,80	-	-	-	-	-	-
Kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)	8.162.330	-	-	-	-	8.103.450	-	-	-	-	99,28	-	-	-	-	-	-

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke					Rata - Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19	20
Kegiatan Koordinasi Penyusunan Aksi SDG'S	2.810.000	-	-	-	-	2.804.940	-	-	-	-	99,82	-	-	-	-	-	-
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	12.258.040	-	-	-	-	12.017.940	-	-	-	-	98,04	-	-	-	-	-	-
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub bidang Pengembangan SDA	6.829.180	-	-	-	-	6.602.780	-	-	-	-	96,68	-	-	-	-	-	-
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif	5.428.860	-	-	-	-	5.415.160	-	-	-	-	99,75	-	-	-	-	-	-
Program Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	8.128.080	-	-	-	-	8.108.050	-	-	-	-	99,75	-	-	-	-	-	-
Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah	8.128.080	-	-	-	-	8.108.050	-	-	-	-	99,75	-	-	-	-	-	-
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	835.181.494	-	-	-	-	796.040.041	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	2.387.000	-	-	-	-	2.001.000	-	-	-	-	83,83	-	-	-	-	-	-
Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	73.410.000	-	-	-	-	65.062.470	-	-	-	-	88,63	-	-	-	-	-	-

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke					Rata - Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19	20
Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	6.875.000	-	-	-	-	6.053.850	-	-	-	-	88,06	-	-	-	-	-	-
Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan	284.352.000	-	-	-	-	265.770.500	-	-	-	-	93,47	-	-	-	-	-	-
Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	80.863.354	-	-	-	-	76.829.111	-	-	-	-	95,01	-	-	-	-	-	-
Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	16.716.941	-	-	-	-	16.110.000	-	-	-	-	96,37	-	-	-	-	-	-
Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	17.078.100	-	-	-	-	16.908.550	-	-	-	-	99,01	-	-	-	-	-	-
Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	11.522.195	-	-	-	-	11.186.000	-	-	-	-	97,08	-	-	-	-	-	-
Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.554.500	-	-	-	-	4.916.500	-	-	-	-	88,51	-	-	-	-	-	-
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000	-	-	-	-	19.910.000	-	-	-	-	99,55	-	-	-	-	-	-
Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	20.493.000	-	-	-	-	18.736.000	-	-	-	-	91,43	-	-	-	-	-	-

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke					Rata - Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19	20
Kegiatan Penyedia makanan dan minuman	15.931.000	-	-	-	-	14.606.260	-	-	-	-	91,68	-	-	-	-	-	-
Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	208.066.000	-	-	-	-	207.391.955	-	-	-	-	99,68	-	-	-	-	-	-
Kegiatan Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran	71.932.404	-	-	-	-	70.557.845	-	-	-	-	98,09	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	215.649.585	-	-	-	-	200.568.118	-	-	-	-	93,01	-	-	-	-	-	-
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	8.500.000	-	-	-	-	7.700.000	-	-	-	-	90,59	-	-	-	-	-	-
Kegiatan Pengadaan mebeleur	8.000.000	-	-	-	-	8.000.000	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-
Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	20.000.000	-	-	-	-	19.999.000	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-
Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	127.349.585	-	-	-	-	113.169.118	-	-	-	-	88,86	-	-	-	-	-	-
Kegiatan Rehab sedang/berat gedung kantor	51.800.000	-	-	-	-	51.700.000	-	-	-	-	99,81	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	18.900.000	-	-	-	-	18.445.900	-	-	-	-	97,60	-	-	-	-	-	-

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke					Rata - Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19	20
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	18.900.000	-	-	-	-	18.445.900	-	-	-	-	97,60	-	-	-	-	-	-
Program Pengembangan Data/Informasi	9.381.850	-	-	-	-	9.048.550	-	-	-	-	96,45	-	-	-	-	-	-
Kegiatan Penyusunan Informasi Pembangunan Daerah	4.940.000	-	-	-	-	4.612.200	-	-	-	-	93,36	-	-	-	-	-	-
Kegiatan Penyusunan Data Indeks Nilai Tukar Petani (NTP)	1.323.650	-	-	-	-	1.323.650	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-
Kegiatan Koordinasi, rekapitulasi dan konsolidasi data teknis dan rencana kegiatan usulan DAK	3.118.200	-	-	-	-	3.112.700	-	-	-	-	99,82	-	-	-	-	-	-
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	5.482.975	-	-	-	-	5.460.975	-	-	-	-	99,60	-	-	-	-	-	-
Kegiatan Koordinasi penetapan rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	2.842.975	-	-	-	-	2.831.975	-	-	-	-	99,61	-	-	-	-	-	-

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke					Rata - Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19	20
Kegiatan Koordinasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	2.640.000	-	-	-	-	2.629.000	-	-	-	-	99,58	-	-	-	-	-	-
Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota menengah dan besar	5.278.850	-	-	-	-	5.263.010	-	-	-	-	99,70	-	-	-	-	-	-
Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	2.492.800	-	-	-	-	2.481.800	-	-	-	-	99,56	-	-	-	-	-	-
Koordinasi Penataan dan Pencegahan Kawasan Kumuh	2.786.050	-	-	-	-	2.781.210	-	-	-	-	99,83	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	90.795.250	-	-	-	-	90.750.150	-	-	-	-	99,95	-	-	-	-	-	-
Kegiatan Peningkatan kapasitas tenaga fasilitator perencanaan	90.795.250	-	-	-	-	90.750.150	-	-	-	-	99,95	-	-	-	-	-	-
Program Penyusunan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemerintahan Daerah	3.662.980	-	-	-	-	3.653.950	-	-	-	-	99,75	-	-	-	-	-	-

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke					Rata - Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19	20
Kegiatan Penyusunan aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemerintah Daerah	3.662.980	-	-	-	-	3.653.950	-	-	-	-	99,75	-	-	-	-	-	-
Program Pengembangan Inovasi Daerah	90.199.610	-	-	-	-	89.851.070	-	-	-	-	99,61	-	-	-	-	-	-
Kegiatan Kajian Ekonomi Pembangunan Daerah dan Kewilayahan	6.310.600	-	-	-	-	6.242.300	-	-	-	-	98,92	-	-	-	-	-	-
Kegiatan Kajian Sosial dan Pemerintahan	7.287.210	-	-	-	-	7.223.670	-	-	-	-	99,13	-	-	-	-	-	-
Kegiatan Penguatan inovasi Pemerintahan dan Layanan Publik	28.303.720	-	-	-	-	28.213.220	-	-	-	-	99,68	-	-	-	-	-	-
Kegiatan Pengembangan Karya Inovasi dan Teknologi Tepat Guna	48.298.080	-	-	-	-	48.171.880	-	-	-	-	99,74	-	-	-	-	-	-
Total	2.219.775.864	6.661.381.083	8.994.689.385	8.539.208.895	8.099.611.617	2.148.657.520	6.193.272.526	8.463.565.043	7.963.528.498	7.599.448.487	60,93	93,04	94,10	93,26	93,82	2.024.902.904	1.899.862.122

Sumber: Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2025

Pengelompokan kode rekening diatur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan struktur bertingkat dari 1-6 level (Akun, Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek, Sub Rincian Obyek) untuk mencakup Aset (1), Kewajiban (2), Ekuitas (3), Pendapatan-LRA (4), Belanja (5), Pembiayaan (6), Pendapatan-LO (7), dan Beban (8), termasuk untuk Dana BOS dan APBD Daerah dengan kode spesifik seperti 5.2.1 Belanja Pegawai dan 5.2.2 Belanja Barang Jasa.

Pengalokasian anggaran pada Bappeda diarahkan untuk memperkuat peran strategis dalam perencanaan, penelitian dan pengembangan. Anggaran difokuskan pada pembiayaan program dan kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan, baik kepada perangkat daerah maupun masyarakat, melalui penyediaan data dan informasi pembangunan yang akurat, perencanaan yang terintegrasi, serta koordinasi lintas sektor yang efektif.

Dukungan anggaran juga digunakan untuk penerapan teknologi informasi dalam sistem perencanaan dan monitoring, serta fasilitasi forum koordinasi perencanaan daerah yang partisipatif. Dengan pengelolaan anggaran yang efektif, diharapkan pelayanan Bappeda menjadi lebih responsif, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu mendorong tercapainya sasaran pembangunan daerah yang selaras dengan prioritas provinsi dan nasional.

Pada periode Renstra 2025-2029, Bappeda berkomitmen untuk terus memperkuat kinerja layanan melalui pengembangan perencanaan yang berbasis data dan bukti, peningkatan integrasi pembangunan antar wilayah, serta akselerasi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Dengan didukung oleh sumber daya manusia, dan partisipasi aktif masyarakat, Bappeda akan tetap konsisten dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah

d. Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

Dalam mendukung proses perencanaan pembangunan, Bappeda secara aktif melayani berbagai kelompok sasaran, yang mencakup:

1. Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah (PD), Bappeda berfungsi sebagai mitra strategis bagi pemerintah daerah, (Perangkat Daerah), dan instansi terkait dalam merumuskan kebijakan serta menyusun program pembangunan berdasarkan kebutuhan dan potensi wilayah.
2. Masyarakat, Bappeda juga mencakup masyarakat luas, termasuk komunitas lokal dan kelompok marginal. Dengan mengutamakan pendekatan partisipatif, Bappeda memastikan aspirasi masyarakat menjadi bagian dari perencanaan Pembangunan.
3. Lembaga Pendidikan dan Penelitian, Bappeda melibatkan lembaga pendidikan dan penelitian sebagai mitra dalam menghasilkan analisis berbasis data serta inovasi kebijakan untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama dari perangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, hingga saat ini, masih ditemukan berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan oleh perangkat daerah, baik dari aspek kualitas, keterjangkauan, transparansi, maupun partisipasi masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai koordinator perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah, Bappeda masih menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi optimalisasi kinerja, yaitu:

1. Belum optimalnya pemantauan dan evaluasi kinerja.
2. Belum optimalnya koordinasi dalam sinkronisasi perencanaan program pembangunan.

Masih rendahnya koordinasi pembangunan daerah, kurangnya sinergi antara perangkat daerah menyebabkan tumpang tindih program dan kurangnya keterpaduan dalam pelaksanaan kegiatan. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan peran Bappeda dalam mengoordinasikan dan mengharmonisasikan seluruh rencana kerja perangkat daerah agar pembangunan lebih efektif dan berkelanjutan

3. Masih belum optimalnya fungsi monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan. Belum optimalnya pemanfaatan data sektoral yang spesifik dalam perencanaan.
4. Belum sinkron/selarasnya usulan musrenbang masyarakat dengan tema pembangunan tahun berkenaan.
5. Hasil evaluasi kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan pembangunan.
6. Masih rendahnya partisipasi publik dalam proses perencanaan.
7. Kegiatan penelitian masih terbatas pada lingkup tertentu, belum mencakup seluruh isu strategis daerah. Koordinasi antar perangkat daerah dalam pelaksanaan penelitian juga belum terbangun dengan baik, sehingga data dan informasi yang dihasilkan sering bersifat parsial dan tidak saling terhubung, akibatnya hasil penelitian belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan, sehingga peluang peningkatan kualitas perencanaan berbasis hasil kajian ilmiah belum dapat dimanfaatkan secara optimal
8. Hasil riset belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam perencanaan dalam pengambil kebijakan.
9. Pengembangan inovasi di perangkat daerah belum berjalan optimal, baik dari sisi jumlah, kualitas, maupun keberlanjutan. Sebagian besar inovasi yang diinisiasi belum terintegrasi ke dalam proses kerja dan belum dimanfaatkan secara luas untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

10. Kurang terfasilitasinya hasil temuan kelitbangan bagi perencanaan pembangunan.
11. Inovasi yang dilaksanakan oleh masyarakat maupun Perangkat Daerah belum terdokumentasi dengan baik, sehingga belum bisa difasilitasi secara optimal.
12. Seringnya terjadi perubahan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

b. Isu Strategis

Berdasarkan uraian permasalahan pelayanan dapat ditentukan isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Kota Payakumbuh:

1. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, lemahnya budaya kinerja, keterbatasan kualitas perencanaan berbasis data sehingga sasaran dan indikator kinerja tidak sepenuhnya mencerminkan prioritas pembangunan, bahkan target yang ditetapkan kurang realistis atau sulit diukur, sistem monitoring dan evaluasi belum berjalan optimal, ditandai dengan pengukuran kinerja yang tidak konsisten, pelaksanaan evaluasi yang kurang berkala dan tindak lanjut atas hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat belum dilaksanakan secara optimal oleh perangkat daerah. Kondisi ini mengakibatkan rekomendasi perbaikan yang telah disampaikan tidak sepenuhnya diimplementasikan, sehingga permasalahan yang sama berpotensi terulang pada periode berikutnya
2. Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan pembangunan daerah. Keterlibatan masyarakat yang seharusnya menjadi elemen penting dalam menyusun perencanaan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan nyata di lapangan, belum optimal. Hal ini tercermin dari minimnya jumlah usulan masyarakat dalam forum-forum perencanaan seperti Forum Konsultasi Publik dan Musrenbang, rendahnya tingkat representasi kelompok rentan. Masyarakat cenderung tidak mengetahui mekanisme maupun saluran yang dapat digunakan untuk menyampaikan aspirasi, serta merasa bahwa keterlibatan mereka

tidak memberikan dampak nyata terhadap hasil perencanaan dan juga dalam pelaksanaan pembangunan daerah, koordinasi dan sinergis antar perangkat daerah dan stakeholder menjadi krusial untuk memastikan keselarasan program, efisiensi sumber daya, dan pencapaian tujuan pembangunan yang terintegrasi. Koordinasi antara sektor-sektor pembangunan masih sering berjalan secara parsial dan sektoral. Perangkat daerah cenderung bekerja berdasarkan prioritas internal masing-masing tanpa adanya sinergi dan kolaborasi yang kuat. Hal ini mengakibatkan tumpang tindih program, alokasi anggaran yang tidak optimal, dan rendahnya efektivitas hasil pembangunan, budaya kerja sektoral dan ego sektoral juga masih menjadi penghambat utama dalam mewujudkan kolaborasi yang harmonis antar instansi. Kondisi ini berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik dan capaian pembangunan daerah yang tidak maksimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan dan mekanisme koordinasi lintas sektor secara sistematis, agar proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan secara sinergis, efisien, dan tepat sasaran. Dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan tepat sasaran, proses evaluasi pengendalian pembangunan memegang peranan yang sangat penting. Namun, hingga saat ini, evaluasi pengendalian pembangunan belum dilaksanakan secara optimal, yang berdampak pada lemahnya pemantauan capaian program dan kegiatan pembangunan. Kondisi ini ditandai dengan belum tersusunnya sistem evaluasi yang komprehensif, kurangnya ketersediaan data yang valid dan real time, serta belum maksimalnya pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar dalam perbaikan kebijakan dan perencanaan ke depan. Selain itu, koordinasi antar perangkat daerah dalam pelaksanaan evaluasi juga masih terbatas, sehingga menghasilkan analisis yang kurang menyeluruh dan tidak mendukung pengambilan keputusan strategis secara efektif. Akibat dari lemahnya evaluasi ini, banyak program pembangunan tidak dapat diukur capaian hasilnya secara jelas, sehingga potensi

ketidakefisienan penggunaan anggaran pun meningkat. Hal ini berdampak pada rendahnya kualitas pembangunan. Untuk itu, diperlukan penguatan sistem dan kapasitas evaluasi pengendalian pembangunan yang berbasis data, terintegrasi lintas sektor, serta mampu memberikan umpan balik secara berkala dalam rangka mendukung siklus perencanaan dan penganggaran yang lebih baik.

3. Belum optimalnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah. Masih rendahnya kolaborasi antara pemerintah daerah dengan lembaga riset dan perguruan tinggi, kurangnya dukungan terhadap budaya inovasi di lingkungan pemerintah, kurang terdokumentasinya hasil riset, dan kurang dimanfaatkannya hasil riset dan inovasi oleh pengambil kebijakan mengakibatkan pemanfaatan hasil riset dan inovasi belum optimal dan masih rendahnya inisiatif dan keterlibatan aktif perangkat daerah dalam menciptakan, mengadopsi, serta mengimplementasikan inovasi di bidang pelayanan publik maupun tata kelola pemerintahan.

Isu Utama Global & Nasional (2025):

1. Kemiskinan dan Kelaparan (SDG 1 & 2): Tren mengkhawatirkan menunjukkan jutaan perempuan dan anak perempuan masih hidup dalam kemiskinan ekstrem, dan anak putus sekolah meningkat tajam
2. Kesetaraan Gender (SDG 5): Meski ada kemajuan hukum, kesenjangan gender dalam kepemimpinan dan ekonomi masih besar, dengan target tahun 2030 terancam.
3. Pendidikan (SDG 4): Peningkatan jumlah anak putus sekolah global menjadi perhatian besar, dengan kartu skor 2025 menyoroti urgensi benchmark nasional
4. Kesehatan (SDG 3): Meskipun ada perbaikan, pandemi COVID-19 membalikkan beberapa capaian, seperti harapan hidup sehat.
5. Energi Terbarukan & Digitalisasi (SDG 7 & 9): Energi terbarukan tumbuh pesat dan diharapkan melampaui batu bara, sementara jangkauan 5G meluas, menjadi peluang transformasi

6. Tantangan Implementasi: Mencari inovasi untuk pembiayaan, memperluas akses, transformasi hijau, dan mempersiapkan SDM menghadapi pekerjaan baru menjadi tantangan di Indonesia

ISU REGIONAL

MISI KE-8 PROPINSI SUMATERA BARAT

1. Tata Kelola pemerintahan bersih dan pelayanan public yang efektif

Misi

Potensi Daerah

1. Indek kualitas perencanaan tahun 2024 adalah 90,5%
2. Kategori tingkat inovasi daerah tahun 2024 adalah inovatif

**TABEL 2.4
ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Indek Kualitas Perencanaan tahun 2024 adalah 90.5%	Belum terintegrasinya perencanaan, penganggaran dan pelaporan	-	Isu tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's) Tujuan ke-16: Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan.	Asta Cita ke-7 : Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Misi ke-8 Provinsi Sumbar : Tata Kelola Pemerintahan Bersih Dan Pelayanan Publik Yang Efektif	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
	Belum optimalnya pemantauan dan evaluasi kinerja					Belum Optimalnya kualitas perencanaan pembangunan pembangunan daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
	Masih belum optimalnya fungsi monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan					Belum optimalnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah
	Kinerja belum sepenuhnya berorientasi hasil					
	Belum optimalnya koordinasi dalam sinkronisasi perencanaan program pembangunan					
	belum optimalnya pemanfaatan data sektoral dan spesifik dalam perencanaan					
	belum sinkron/selarasnya usulan musrenbang masyarakat dengan tema pembangunan tahun berkenaan					
	Hasil evaluasi kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan pembangunan					

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
	Sistem informasi perencanaan yang digunakan belum sepenuhnya terintegrasi, sehingga menyulitkan proses koordinasi dan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat					
	Masih rendahnya partisipasi public dalam proses perencanaan.					
	Kegiatan penelitian masih terbatas pada lingkup tertentu, belum mencakup seluruh isu strategis daerah					
	Hasil riset belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam perencanaan dalam pengambil kebijakan					
	Pengembangan inovasi di perangkat daerah belum berjalan optimal					

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
	Kurang terfasilitasinya hasil temuan kelitbangan bagi perencanaan pembangunan					

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), reformasi birokrasi menjadi pilar utama dalam pembangunan institusi yang efektif, efisien dan berintegritas. Oleh karena itu, tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2025 - 2029 adalah **"Meningkatnya kualitas perencanaan berbasis inovasi dan kelitbangan"**.

Tata kelola pemerintahan yang akuntabel adalah sistem pemerintahan yang transparan, bertanggung jawab, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Akuntabilitas dalam pemerintahan mencakup aspek pengelolaan keuangan negara, pelayanan publik, serta kebijakan yang dibuat berdasarkan prinsip keadilan dan efisiensi.

Akuntabilitas dalam birokrasi juga menjadi penentu terhadap sejauh mana perangkat daerah mampu mempertanggungjawabkan kinerja dan pengelolaan sumber daya secara terbuka kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Hal ini akan didorong melalui peningkatan kualitas perencanaan, pelaporan kinerja, pengawasan internal, serta pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung sistem pengendalian yang efektif.

Melalui tujuan ini, diharapkan tercipta lingkungan birokrasi yang profesional, responsif, dan berorientasi pada hasil, yang pada akhirnya dapat memperkuat peran pemerintah daerah dalam menciptakan pelayanan publik yang berkualitas serta pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029

Sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2025–2029 merupakan bagian penting yang menjembatani antara tujuan strategis dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Sasaran Renstra disusun untuk memberikan arah yang lebih terfokus, terukur, dan

terintegrasi, sehingga upaya pencapaian visi dan misi pembangunan daerah dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

TABEL 3.1
TABEL TUJUAN, SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025–2029

No	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Meningkatnya kualitas perencanaan berbasis inovasi dan kelitbang an		Nilai evaluasi AKIP Komponen Perencanaan Kinerja	25,04	26,00	26,01	26,02	26,03	26,04	26,05
				Indeks inovasi daerah	54,62	54,85	55,15	55,25	55,50	55,95	56,05
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	83,00	85,00	85,50	86,00	86,50	87,00	87,50	
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah		90,00	90,50	91,00	91,50	92,00	92,50	
			Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembang		86,00	87,00	88,00	90,00	92,00	93,00	

			unan daerah									
--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber: Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2025

Sasaran Renstra Bappeda dirumuskan berdasarkan analisis terhadap isu-isu strategis pembangunan daerah, prioritas nasional dan daerah, serta hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya. Sasaran ini menguraikan apa yang ingin dicapai Bappeda selama periode perencanaan 2025 - 2030, baik dalam aspek penyusunan dokumen perencanaan, koordinasi lintas sektor, pelaksanaan penelitian dan pengembangan, hingga fasilitasi inovasi daerah.

3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, Bappeda menetapkan beberapa strategi, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas kinerja perangkat daerah;
2. Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah;
4. Mengoptimalkan pengembangan dan penelitian serta inovasi daerah dalam pelayanan publik;
5. Penguatan sinergitas perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas propinsi dan nasional;

TABEL 3.2
PENAHAPAN RENSTRA BAPPEDA KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2025-2029

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> • kesesuaian RENSTRA dan RPJMD • Menetapkan baseline dan target tahunan periode 2026, Indikator kinerja (IKU/IKT) tahun dasar 2026 yang jelas, terukur, dan berbasis data • penyusunan roadmap inovasi & kelitbangan • Pemetaan kapasitas riset & inovasi daerah • Pengembangan database penelitian & inovasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan evaluasi pembangunan 2026 yang lengkap (ekonomi, sosial, infrastruktur, pelayanan publik) • Menyesuaikan target kinerja 2027–2030 berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya • Integrasi hasil riset ke dokumen perencanaan • Uji coba inovasi perencanaan di sektor prioritas • Kerjasama dengan perguruan tinggi & lembaga riset 	<ul style="list-style-type: none"> • konsolidasi capaian 2 tahun pertama • penguatan Renja dan evaluasi • Evaluasi capaian inovasi & kelitbangan • Replikasi inovasi yang berhasil ke sektor lain • Penyempurnaan regulasi daerah tentang riset & inovasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan belanja pembangunan agar tepat sasaran • evaluasi mendalam untuk strategi percepatan • Pemanfaatan Satu Data Indonesia & dashboard perencanaan • Perluasan penerapan inovasi ke seluruh perangkat daerah • Penguatan riset daerah (kerjasama multipihak) 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen transisi pembangunan (legacy document) tersusun • Program strategis yang harus dilanjutkan 2031–2036 teridentifikasi • Evaluasi akhir capaian tujuan Renstra <ul style="list-style-type: none"> • Integrasi hasil litbang ke RPJMD berikutnya • Rekomendasi kebijakan inovatif untuk periode selanjutnya

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Bappeda menetapkan beberapa arah kebijakan, yaitu:

1. Menindaklanjuti hasil rekomendasi Inspektorat terhadap perbaikan kinerja perangkat daerah;
2. Meningkatkan ketepatan, konsistensi, dan keterpaduan dokumen perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA) sesuai

- dengan Peraturan Perundang-Undangan dan kebijakan propinsi dan nasional;
3. Memperkuat data dan informasi pembangunan daerah melalui integrasi data sektoral dalam Satu Data Indonesia;
 4. Optimalisasi pemantauan dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah secara berkala;
 5. Mengoptimalkan pemanfaatan SIPD atau sistem terintegrasi lain untuk memastikan keselarasan prioritas dan pendanaan;
 6. Mengoptimalkan penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan perencanaan dan implementasi program ke depan;
 7. Memperkuat pelibatan stakeholder (PD, masyarakat, akademisi) dalam proses perencanaan melalui forum konsultasi publik dan Musrenbang;
 8. Mendorong penguatan inovasi daerah di aspek tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan inovasi lainnya yang mendukung efisiensi dan efektivitas program pemerintah;
 9. Memfasilitasi pengembangan dan replikasi inovasi yang mendukung peningkatan kinerja pembangunan dan pelayanan masyarakat;
 10. Meningkatkan kualitas kajian strategis, riset, dan analisis data untuk mendukung perumusan kebijakan;
 11. Merekomendasikan agar setiap penyusunan kebijakan daerah didukung oleh data, kajian teknis, atau hasil penelitian;
 12. Meningkatkan jumlah dan kualitas riset daerah yang aplikatif dan relevan dengan prioritas pembangunan;
 13. Optimalisasi perumusan dan penerapan kebijakan daerah berbasis Pentahelix (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi dan media)

TABEL 3.3
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

VISI	Payakumbuh Maju Bermartabat Melalui Pemberdayaan, Pengembangan Kualitas Pendidikan, dan Sentra UMKM yang Kompetitif		
MISI	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang profesional dan kondusif		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas perencanaan berbasis inovasi dan kelibangan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatkan kualitas kinerja perangkat daerah	Menindaklanjuti hasil rekomendasi Inspektorat terhadap perbaikan kinerja perangkat daerah
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah	Meningkatkan ketepatan, konsistensi, dan keterpaduan dokumen perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA) sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan kebijakan propinsi
			Memperkuat data dan informasi pembangunan daerah melalui integrasi data sektoral dalam Satu Data Indonesia
			Mengoptimalkan penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan perencanaan dan implementasi program ke depan
			Optimalisasi pemantauan dan evaluasi implementasi dokumen perencanaan pembangunan daerah secara berkala
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah	Memperkuat pelibatan stakeholder (PD, masyarakat, akademisi) dalam proses perencanaan melalui forum konsultasi publik dan Musrenbang
		Penguatan sinergitas perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas propinsi dan nasional	Mengoptimalkan pemanfaatan SIPD atau sistem terintegrasi lain untuk memastikan keselarasan prioritas dan pendanaan

VISI	Payakumbuh Maju Bermartabat Melalui Pemberdayaan, Pengembangan Kualitas Pendidikan, dan Sentra UMKM yang Kompetitif		
MISI	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang profesional dan kondusif		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Mengoptimalkan pengembangan dan penelitian serta inovasi daerah dalam pelayanan publik	<p>Mendorong penguatan inovasi daerah di aspek tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan inovasi lainnya yang mendukung efisiensi dan efektivitas program pemerintah</p> <p>Memfasilitasi pengembangan dan replikasi inovasi yang mendukung peningkatan kinerja pembangunan dan pelayanan masyarakat</p> <p>Meningkatkan kualitas kajian strategis, riset, dan analisis data untuk mendukung perumusan kebijakan</p> <p>Merekomendasikan agar setiap penyusunan kebijakan daerah didukung oleh data, kajian teknis, atau hasil penelitian</p> <p>Meningkatkan jumlah dan kualitas riset daerah yang aplikatif dan relevan dengan prioritas pembangunan</p> <p>Optimalisasi perumusan dan penerapan kebijakan daerah berbasis Pentahelix (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi dan media)</p>

TABEL 3.4
ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025 – 2029

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	2	3	4	5
	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pemerintah daerah	Menindaklanjuti hasil rekomendasi Inspektorat terhadap perbaikan kinerja perangkat daerah	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	2	3	4	5
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah.	Meningkatkan ketepatan, konsistensi, dan keterpaduan dokumen perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD, RKP, RENSTRA, RENJA) sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan dan kebijakan propinsi dan nasional	
		Mengoptimalkan pengembangan dan penelitian serta inovasi daerah dalam layanan publik	Memperkuat data dan informasi pembangunan daerah melalui integrasi data sektoral dalam Satu Data Indonesia	
			Optimalisasi pemantauan dan evaluasi implementasi dokumen perencanaan pembangunan daerah secara berkala	
			Memperkuat pelibatan stakeholder (PD, masyarakat, akademisi) dalam proses perencanaan melalui forum konsultasi publik dan Musrenbang	
			Mendorong penguatan inovasi daerah di aspek tata kelola pemerintah, pelayanan publik dan inovasi lainnya yang mendukung efisiensi dan efektivitas program pemerintah	
			Memfasilitasi pengembangan dan replikasi inovasi yang mendukung peningkatan kinerja pembangunan dan pelayanan Masyarakat	
			Meningkatkan kualitas kajian strategis, riset, dan analisis data untuk mendukung perumusan kebijakan	
			Merekomendasikan agar setiap penyusunan kebijakan/program daerah didukung oleh data, kajian teknis, atau hasil penelitian	
			Meningkatkan jumlah dan kualitas riset daerah yang aplikatif dan relevan dengan prioritas pembangunan	
			Optimalisasi perumusan dan penerapan kebijakan daerah berbasis Pentahelix (Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi dan media)	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1.1 Uraian Program

Nomenklatur program pembangunan merujuk pada Permendagri 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan beberapa kali melalui Keputusan Mendagri. Terakhir, Keputusan Kemendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024. Program-program yang dijalankan dalam mendukung perencanaan, penelitian dan pengembangan Kota Payakumbuh Tahun 2025–2029 dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan nasional adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah serangkaian kegiatan untuk mendukung operasional dan administrasi perangkat daerah agar berjalan lancar. Program ini mencakup penyediaan sumber daya untuk administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum), jasa penunjang (listrik, air, surat-menyurat), dan pemeliharaan barang milik daerah seperti kendaraan dinas operasional. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan kinerja perangkat daerah optimal dan pelayanan publik berjalan baik.

2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah (PPEPD) adalah serangkaian kegiatan terpadu untuk merancang, memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan di suatu daerah agar sesuai dengan visi, misi, dan target yang telah ditetapkan. Proses ini meliputi perencanaan jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD), dan tahunan (RKPD), diikuti dengan pengendalian untuk memastikan implementasi sesuai rencana, dan diakhiri dengan evaluasi untuk mengukur keberhasilan dan dampaknya. Tujuannya adalah untuk mewujudkan pembangunan daerah yang efektif dan berkelanjutan.

3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebuah proses untuk menyelaraskan berbagai perencanaan pembangunan di tingkat daerah, baik antar bidang (pemerintahan, ekonomi, infrastruktur) maupun dengan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJMD dan RKPD. Tujuan utamanya adalah agar seluruh kegiatan pembangunan di daerah selaras, terpadu, efektif, dan mencapai target yang ditetapkan.

4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Tujuan utama program ini adalah menyediakan landasan ilmiah dan data faktual untuk perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah yang efektif.

5. Program Riset dan Inovasi Daerah

Program Riset dan Inovasi Daerah adalah upaya pemerintah daerah untuk memajukan daerahnya melalui kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi, dan inovasi yang terkoordinasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan daya saing daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan kebijakan berbasis bukti, dan menyebarluaskan hasil-hasil penelitian untuk dimanfaatkan masyarakat luas.

TABEL 4.1 . PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

NSPK	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Meningkatnya kualitas perencanaan berbasis inovasi dan kelitbangan				Nilai evaluasi AKIP Komponen Perencanaan Kinerja		
					Indeks inovasi daerah		
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah			Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat		
			Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah		Nilai IKM	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	
				Meningkatnya kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
				Meningkatnya administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Meningkatnya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Meningkatnya kualitas pengadaan BMD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	

NSPK	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
				Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Terlaksananya fasilitas kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	
				Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terlaksananya dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	
				Tersedianya kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya mebel	Tersedianya Mebel	Pengadaan Mebel	
				Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya BMD penunjang urusan pemerintah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	
						Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah			Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah		
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah		Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
					Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD		

NSPK	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
					Persentase hasil penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan Perkada/ Perda	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
				Terlaksananya konsultasi publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Pelaksanaan Konsultasi Publik	
				Terlaksananya musrenbang kabupaten/kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	
				Tersedianya usulan-usulan yang telah terverifikasi oleh kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	
				Ditetapkannya dokumen perencanaan pembanguna daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti	Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan perencanaan	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
				Terinputnya analisa data dan informasi untuk perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
				Terbinanya sumber daya manusia perangkat daerah dalam pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	
				Tersusunnya dokumen profil pembangunan daerah kabupaten/kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya laporan pembangunan daerah yang informatif, akurat, dan akuntabel	Persentase Dokumen Perencanaan dan dokumen perangkat daerah yang dikendalikan dan dievaluasi	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
				Terlaksananya pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di kabupaten/kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya laporan hasil monitoring dan evaluasi berkala pelaksanaan pembangunan daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
				Meningkatnya transparansi, ak	Persentase implementasi SIPD sesuai tahapan perencanaan	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	

NSPK	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
				Terlaksananya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
				Terlaksananya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan		Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan		Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA		Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA		
				Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase hasil koordinasi pengendalian yang ditindaklanjuti bidang pemerintah dan pembangunan manusia	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
					Persentase PD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras bidang pemerintah dan pembangunan manusia		
				Tersusnya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
				Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	

NSPK	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
				Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	
				Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPJMD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPJMD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPJMD)	
				Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
				Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang pembangunan manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
				Laporan Hasil Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase hasil koordinasi pengendalian yang ditindaklanjuti bidang ekonomi	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
					Persentase PD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras bidang ekonomi		
						Persentase hasil koordinasi pengendalian dan ditindaklanjuti bidang perekonomian dan SDA	
				Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPJMD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPJMD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPJMD)	
				Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	

NSPK	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
				Terlaksananya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
				Sinronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	
				Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
				Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	
				Sinronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	
				Laporan Hasil Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase hasil koordinasi pengendalian yang ditindaklanjuti bidang Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
					Persentase PD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras bidang Infrastruktur dan		
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	

NSPK	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	
		Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah			Persentase kebijakan berbasis bukti		
			Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah		Persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	
						Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	
				Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	
				Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	

NSPK	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
						Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
				Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
				Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	
				Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	
				Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	
			Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah		Persentase fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	Program Riset dan inovasi daerah	
						Invensi dan Inovasi	
				Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	
				Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	

**TABEL 4.2 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN
PENDANAAN PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01 - PERENCANAAN				7.986.571.099,00		24.150.066.534,00		19.287.751.665,00		18.025.599.461,00		19.048.211.795,00		
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.000.537.499,00		18.120.066.534,00		12.956.251.665,00		11.694.099.461,00		12.400.136.795,00		
Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah	Nilai IKM (Indeks)	91,00	91,70	7.000.537.499,00	92,00	18.120.066.534,00	92,50	12.956.251.665,00	92,70	11.694.099.461,00	93,00	12.400.136.795,00	5.01.5.05.0.00.01.00 00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				86.481.350,00		613.181.767,00		643.840.855,00		643.840.855,00		676.032.898,00		
Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1	86.481.350,00	1	613.181.767,00	1	643.840.855,00	1	643.840.855,00	1	676.032.898,00		
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	2		2		2		2					
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	5		4		4		5					
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6	7		6		6		6					
5.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				14.069.050,00		113.181.767,00		118.840.855,00		118.840.855,00		124.782.898,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	5	14.069.050,00	4	113.181.767,00	4	118.840.855,00	5	118.840.855,00	5	124.782.898,00		
5.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				69.766.500,00		100.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		110.250.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6	7	69.766.500,00	6	100.000.000,00	6	105.000.000,00	6	105.000.000,00	6	110.250.000,00		
5.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1.322.500,00		200.000.000,00		210.000.000,00		210.000.000,00		220.500.000,00		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1	1.322.500,00	1	200.000.000,00	1	210.000.000,00	1	210.000.000,00	1	220.500.000,00		
5.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				1.323.300,00		200.000.000,00		210.000.000,00		210.000.000,00		220.500.000,00		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	2	1.323.300,00	2	200.000.000,00	2	210.000.000,00	2	210.000.000,00	2	220.500.000,00		
5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.814.389.393,00		8.252.209.582,00		8.664.820.061,00		8.664.820.061,00		9.098.061.064,00		
Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	39	39	5.814.389.393,00	46	8.252.209.582,00	46	8.664.820.061,00	46	8.664.820.061,00	46	9.098.061.064,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN				
			2026		2027		2028		2029		2030							
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU						
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1		1		1		1		1							
5.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.418.150.393,00		7.743.379.359,00		8.130.548.327,00		8.130.548.327,00		8.537.075.743,00						
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	39	39	5.418.150.393,00	46	7.743.379.359,00	46	8.130.548.327,00	46	8.130.548.327,00	46	8.537.075.743,00						
5.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				396.239.000,00		508.830.223,00		534.271.734,00		534.271.734,00		560.985.321,00						
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	396.239.000,00	1	508.830.223,00	1	534.271.734,00	1	534.271.734,00	1	560.985.321,00						
5.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				46.473.800,00		48.797.490,00		51.237.365,00		51.237.365,00		53.799.233,00						
Persentase penyediaan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	46	46.473.800,00	46	48.797.490,00	46	51.237.365,00	46	51.237.365,00	46	53.799.233,00						
5.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				46.473.800,00		48.797.490,00		51.237.365,00		51.237.365,00		53.799.233,00						
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	46	46.473.800,00	46	48.797.490,00	46	51.237.365,00	46	51.237.365,00	46	53.799.233,00						
5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				493.164.806,00		599.793.195,00		909.964.659,00		647.812.455,00		801.535.438,00						
Indeks layanan administrasi perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	493.164.806,00	1	599.793.195,00	1	909.964.659,00	1	647.812.455,00	1	801.535.438,00						
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1		1	1	1	1		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	2		1		1		1		1		1	1	1	1		
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	2		1		1		1		1		1	1	1	1		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	8		1		1		1		1		1	1	1	1		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	0		1		1		1		1		1	1	1	1		
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1		1		1		1		1		1	1	1	1		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1		1	1	1	1		
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1	1	1	1		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1	1	1	1		
5.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.793.400,00		5.033.070,00		5.284.724,00		5.284.724,00		5.548.960,00						

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	2	4.793.400,00	1	5.033.070,00	1	5.284.724,00	1	5.284.724,00	1	5.548.960,00		
5.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		1.388.625,00		1.458.056,00		1.458.056,00		1.530.959,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	0	0,00	1	1.388.625,00	1	1.458.056,00	1	1.458.056,00	1	1.530.959,00		
5.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				17.445.900,00		18.318.195,00		19.234.105,00		19.234.105,00		20.195.810,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	17.445.900,00	1	18.318.195,00	1	19.234.105,00	1	19.234.105,00	1	20.195.810,00		
5.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				29.993.656,00		31.493.338,00		33.068.005,00		33.068.005,00		34.721.405,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	8	29.993.656,00	1	31.493.338,00	1	33.068.005,00	1	33.068.005,00	1	34.721.405,00		
5.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				14.962.100,00		15.710.205,00		16.495.715,00		16.495.715,00		17.320.501,00		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	2	14.962.100,00	1	15.710.205,00	1	16.495.715,00	1	16.495.715,00	1	17.320.501,00		
5.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				8.866.000,00		9.309.300,00		9.774.765,00		9.774.765,00		10.263.503,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	8.866.000,00	1	9.309.300,00	1	9.774.765,00	1	9.774.765,00	1	10.263.503,00		
5.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				4.991.000,00		5.240.550,00		5.502.578,00		5.502.578,00		5.777.706,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	4.991.000,00	1	5.240.550,00	1	5.502.578,00	1	5.502.578,00	1	5.777.706,00		
5.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				397.609.000,00		483.299.912,00		787.646.711,00		525.494.507,00		673.101.594,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	397.609.000,00	1	483.299.912,00	1	787.646.711,00	1	525.494.507,00	1	673.101.594,00		
5.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1.322.500,00		5.000.000,00		5.250.000,00		5.250.000,00		5.512.500,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	1	1.322.500,00	1	5.000.000,00	1	5.250.000,00	1	5.250.000,00	1	5.512.500,00		
5.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				13.181.250,00		25.000.000,00		26.250.000,00		26.250.000,00		27.562.500,00		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1	13.181.250,00	1	25.000.000,00	1	26.250.000,00	1	26.250.000,00	1	27.562.500,00		
5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				52.052.950,00		7.650.000.000,00		1.682.500.000,00		682.500.000,00		716.625.000,00		
Persentase ketersediaan BMD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	3	52.052.950,00	1	7.650.000.000,00	1	1.682.500.000,00	1	682.500.000,00	1	716.625.000,00		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		1		1		0		0			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	6		10		10		10		10			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	0		3		3		3		3			
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		1		0		0		0			
5.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		100.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		110.250.000,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	0	0,00	3	100.000.000,00	3	105.000.000,00	3	105.000.000,00	3	110.250.000,00		
5.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				8.500.700,00		100.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		110.250.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	3	8.500.700,00	1	100.000.000,00	1	105.000.000,00	1	105.000.000,00	1	110.250.000,00		
5.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				43.552.250,00		300.000.000,00		315.000.000,00		315.000.000,00		330.750.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	6	43.552.250,00	10	300.000.000,00	10	315.000.000,00	10	315.000.000,00	10	330.750.000,00		
5.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		5.000.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	1	5.000.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		2.000.000.000,00		1.000.000.000,00		0,00		0,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	1	2.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	0	0,00	0	0,00		
5.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		150.000.000,00		157.500.000,00		157.500.000,00		165.375.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	1	150.000.000,00	1	157.500.000,00	1	157.500.000,00	1	165.375.000,00		
5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				235.177.200,00		400.000.000,00		420.000.000,00		420.000.000,00		441.000.000,00		
Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	235.177.200,00	1	400.000.000,00	1	420.000.000,00	1	420.000.000,00	1	441.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
5.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				82.997.200,00		200.000.000,00		210.000.000,00		210.000.000,00		220.500.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	82.997.200,00	1	200.000.000,00	1	210.000.000,00	1	210.000.000,00	1	220.500.000,00		
5.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				152.180.000,00		200.000.000,00		210.000.000,00		210.000.000,00		220.500.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	152.180.000,00	1	200.000.000,00	1	210.000.000,00	1	210.000.000,00	1	220.500.000,00		
5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				272.798.000,00		556.084.500,00		583.888.725,00		583.888.725,00		613.083.162,00		
Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)			272.798.000,00	1	556.084.500,00	1	583.888.725,00	1	583.888.725,00	1	613.083.162,00		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	25	27		27		27		27		27			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	26	16		26		26		26		27			
5.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				39.190.000,00		41.149.500,00		43.206.975,00		43.206.975,00		45.367.324,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	39.190.000,00	1	41.149.500,00	1	43.206.975,00	1	43.206.975,00	1	45.367.324,00		
5.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				204.700.000,00		214.935.000,00		225.681.750,00		225.681.750,00		236.965.838,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	25	27	204.700.000,00	27	214.935.000,00	27	225.681.750,00	27	225.681.750,00	27	236.965.838,00		
5.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				17.260.000,00		150.000.000,00		157.500.000,00		157.500.000,00		165.375.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	26	16	17.260.000,00	26	150.000.000,00	26	157.500.000,00	26	157.500.000,00	27	165.375.000,00		
5.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				11.648.000,00		145.000.000,00		152.500.000,00		152.500.000,00		160.375.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	11.648.000,00	1	145.000.000,00	1	152.500.000,00	1	152.500.000,00	1	160.375.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)			0,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				545.303.825,00		2.260.000.000,00		2.373.000.000,00		2.373.000.000,00		2.491.650.000,00		
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	100	100	545.303.825,00	100	2.260.000.000,00	100	2.373.000.000,00	100	2.373.000.000,00	100	2.491.650.000,00	5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	100	100		100		100		100		100			
5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				368.793.375,00		1.150.000.000,00		1.207.500.000,00		1.207.500.000,00		1.267.875.000,00		
Persentase hasil penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan Perkada/ Perda	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	2	1	368.793.375,00	1	1.150.000.000,00	1	1.207.500.000,00	2	1.207.500.000,00	1	1.267.875.000,00		
	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)	25	25		25		25		25		25			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	4	2		2		2		3		2			
	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	2	1		1		1		2		1			
5.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Konsultasi Publik				29.999.775,00		300.000.000,00		315.000.000,00		315.000.000,00		330.750.000,00		
Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	2	1	29.999.775,00	1	300.000.000,00	1	315.000.000,00	2	315.000.000,00	1	330.750.000,00		
5.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota				71.614.975,00		300.000.000,00		315.000.000,00		315.000.000,00		330.750.000,00		
Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	2	1	71.614.975,00	1	300.000.000,00	1	315.000.000,00	2	315.000.000,00	1	330.750.000,00		
5.01.02.2.01.0006 - Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan				17.999.950,00		250.000.000,00		262.500.000,00		262.500.000,00		275.625.000,00		
Tersedianya Usulan-Usulan yang Telah Terverifikasi oleh Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)	25	25	17.999.950,00	25	250.000.000,00	25	262.500.000,00	25	262.500.000,00	25	275.625.000,00		
5.01.02.2.01.0007 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota				249.178.675,00		300.000.000,00		315.000.000,00		315.000.000,00		330.750.000,00		
Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	4	2	249.178.675,00	2	300.000.000,00	2	315.000.000,00	3	315.000.000,00	2	330.750.000,00		
5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				11.500.000,00		250.000.000,00		262.500.000,00		262.500.000,00		275.625.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)	1	0	11.500.000,00	0	250.000.000,00	0	262.500.000,00	0	262.500.000,00	0	275.625.000,00		
	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	0	0		31		31		31		31			
5.01.02.2.02.0001 - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.01.02.2.02.0002 - Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah				0,00		100.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		110.250.000,00		
Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	0	0	0,00	31	100.000.000,00	31	105.000.000,00	31	105.000.000,00	31	110.250.000,00		
5.01.02.2.02.0003 - Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota				11.500.000,00		150.000.000,00		157.500.000,00		157.500.000,00		165.375.000,00		
Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	1	1	11.500.000,00	1	150.000.000,00	1	157.500.000,00	1	157.500.000,00	1	165.375.000,00		
5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				27.190.200,00		360.000.000,00		378.000.000,00		378.000.000,00		396.900.000,00		
jumlah dokumen hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	1	1	27.190.200,00	1	360.000.000,00	1	378.000.000,00	1	378.000.000,00	1	396.900.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
5.01.02.2.03.0001 - Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota				15.190.450,00		160.000.000,00		168.000.000,00		168.000.000,00		176.400.000,00		
Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	1	1	15.190.450,00	1	160.000.000,00	1	168.000.000,00	1	168.000.000,00	1	176.400.000,00		
5.01.02.2.03.0003 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah				11.999.750,00		200.000.000,00		210.000.000,00		210.000.000,00		220.500.000,00		
Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	1	1	11.999.750,00	1	200.000.000,00	1	210.000.000,00	1	210.000.000,00	1	220.500.000,00		
5.01.02.2.04 - Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				137.820.250,00		500.000.000,00		525.000.000,00		525.000.000,00		551.250.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Persentase implementasi SIPD sesuai tahapan perencanaan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	2	137.820.250,00	2	500.000.000,00	2	525.000.000,00	2	525.000.000,00	2	551.250.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah (Dokumen)	3	2		2		2		3		2			
5.01.02.2.04.0002 - Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				87.820.500,00		300.000.000,00		315.000.000,00		315.000.000,00		330.750.000,00		
Terlaksananya Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah (Dokumen)	3	2	87.820.500,00	2	300.000.000,00	2	315.000.000,00	3	315.000.000,00	2	330.750.000,00		
5.01.02.2.04.0003 - Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				49.999.750,00		200.000.000,00		210.000.000,00		210.000.000,00		220.500.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	2	49.999.750,00	2	200.000.000,00	2	210.000.000,00	2	210.000.000,00	2	220.500.000,00		
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				440.729.775,00		3.770.000.000,00		3.958.500.000,00		3.958.500.000,00		4.156.425.000,00		
1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 2. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan kewilayahan 3. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	100	100	440.729.775,00	100	3.770.000.000,00	100	3.958.500.000,00	100	3.958.500.000,00	100	4.156.425.000,00	5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	100	100		100		100		100		100			
5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				204.899.825,00		1.220.000.000,00		1.281.000.000,00		1.281.000.000,00		1.345.050.000,00		
Meningkatnya hasil koordinasi pengendalian yang ditindaklanjuti bidang pemerintah dan pembangunan manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP) (Dokumen)	3	0	204.899.825,00	2	1.220.000.000,00	2	1.281.000.000,00	3	1.281.000.000,00	2	1.345.050.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	0	0		2		2		3		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	3	2		2		2		3		2			
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	0	2		2		2		3		2			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	3	2		2		2		3		2			
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	0	2		2		2		3		2			
	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	0	0		2		2		3		2			
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	0	0		2		2		3		2			
5.01.03.2.01.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				0,00		100.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		110.250.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	3	0	0,00	2	100.000.000,00	2	105.000.000,00	3	105.000.000,00	2	110.250.000,00		
5.01.03.2.01.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				0,00		100.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		110.250.000,00		
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	0	0	0,00	2	100.000.000,00	2	105.000.000,00	3	105.000.000,00	2	110.250.000,00		
5.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				0,00		100.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		110.250.000,00		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	0	0	0,00	2	100.000.000,00	2	105.000.000,00	3	105.000.000,00	2	110.250.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01.03.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan				0,00		600.000.000,00		630.000.000,00		630.000.000,00		661.500.000,00		
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	0	0	0,00	2	600.000.000,00	2	630.000.000,00	3	630.000.000,00	2	661.500.000,00		
5.01.03.2.01.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				86.788.150,00		110.000.000,00		115.500.000,00		115.500.000,00		121.275.000,00		
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	3	2	86.788.150,00	2	110.000.000,00	2	115.500.000,00	3	115.500.000,00	2	121.275.000,00		
5.01.03.2.01.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				40.989.225,00		55.000.000,00		57.750.000,00		57.750.000,00		60.637.500,00		
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	0	2	40.989.225,00	2	55.000.000,00	2	57.750.000,00	3	57.750.000,00	2	60.637.500,00		
5.01.03.2.01.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				25.230.050,00		100.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		110.250.000,00		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	0	2	25.230.050,00	2	100.000.000,00	2	105.000.000,00	3	105.000.000,00	2	110.250.000,00		
5.01.03.2.01.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia				51.892.400,00		55.000.000,00		57.750.000,00		57.750.000,00		60.637.500,00		
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	3	2	51.892.400,00	2	55.000.000,00	2	57.750.000,00	3	57.750.000,00	2	60.637.500,00		
Meningkatnya PD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras bidang pemerintah dan pembangunan manusia				0		0		0		0		0		
5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				29.979.950,00		1.290.000.000,00		1.354.500.000,00		1.354.500.000,00		1.422.225.000,00		
Meningkatnya hasil koordinasi pengendalian yang ditindaklanjuti bidang perekonomian dan SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	0	2	29.979.950,00	2	1.290.000.000,00	2	1.354.500.000,00	3	1.354.500.000,00	2	1.422.225.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	0	0		2		2		3		2			
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	0	0		2		2		3		2			
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	3	2		2		2		3		2			
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	0	0		2		2		3		2			
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	3	2		2		2		3		2			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	0	0		2		2		3		2			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	0	2		2		2		3		2			
5.01.03.2.02.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				7.499.750,00		90.000.000,00		94.500.000,00		94.500.000,00		99.225.000,00		
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	0	2	7.499.750,00	2	90.000.000,00	2	94.500.000,00	3	94.500.000,00	2	99.225.000,00		
5.01.03.2.02.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				7.493.350,00		100.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		110.250.000,00		
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	3	2	7.493.350,00	2	100.000.000,00	2	105.000.000,00	3	105.000.000,00	2	110.250.000,00		
5.01.03.2.02.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				7.487.050,00		100.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		110.250.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	3	2	7.487.050,00	2	100.000.000,00	2	105.000.000,00	3	105.000.000,00	2	110.250.000,00		
5.01.03.2.02.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian				7.499.800,00		200.000.000,00		210.000.000,00		210.000.000,00		220.500.000,00		
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	0	2	7.499.800,00	2	200.000.000,00	2	210.000.000,00	3	210.000.000,00	2	220.500.000,00		
5.01.03.2.02.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				0,00		200.000.000,00		210.000.000,00		210.000.000,00		220.500.000,00		
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	0	0	0,00	2	200.000.000,00	2	210.000.000,00	3	210.000.000,00	2	220.500.000,00		
5.01.03.2.02.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				0,00		200.000.000,00		210.000.000,00		210.000.000,00		220.500.000,00		
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	0	0	0,00	2	200.000.000,00	2	210.000.000,00	3	210.000.000,00	2	220.500.000,00		
5.01.03.2.02.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				0,00		200.000.000,00		210.000.000,00		210.000.000,00		220.500.000,00		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	0	0	0,00	2	200.000.000,00	2	210.000.000,00	3	210.000.000,00	2	220.500.000,00		
5.01.03.2.02.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA				0,00		200.000.000,00		210.000.000,00		210.000.000,00		220.500.000,00		
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	0	0	0,00	2	200.000.000,00	2	210.000.000,00	3	210.000.000,00	2	220.500.000,00		
Meningkatnya Persentase PD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras bidang perekonomian dan SDA				0		0		0		0		0		
5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah				205.850.000,00		1.260.000.000,00		1.323.000.000,00		1.323.000.000,00		1.389.150.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya hasil koordinasi pengendalian yang ditindaklanjuti bidang Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	3	2	205.850.000,00	2	1.260.000.000,00	2	1.323.000.000,00	2	1.323.000.000,00	2	1.389.150.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)	0	0		2		2		3		2			
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	3	2		2		2		3		2			
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	0	0		2		2		3		2			
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	3	2		2		2		3		2			
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	0	0		2		2		3		2			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	0	0		2		2		3		2			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	0	2		2		2		3		2			
5.01.03.2.03.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				9.253.100,00		250.000.000,00		262.500.000,00		262.500.000,00		275.625.000,00		
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	0	2	9.253.100,00	2	250.000.000,00	2	262.500.000,00	3	262.500.000,00	2	275.625.000,00		
5.01.03.2.03.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				70.212.150,00		100.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		110.250.000,00		
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	3	2	70.212.150,00	2	100.000.000,00	2	105.000.000,00	2	105.000.000,00	2	110.250.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01.03.2.03.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				37.248.650,00		100.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		110.250.000,00		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	3	2	37.248.650,00	2	100.000.000,00	2	105.000.000,00	3	105.000.000,00	2	110.250.000,00		
5.01.03.2.03.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur				89.136.100,00		500.000.000,00		525.000.000,00		525.000.000,00		551.250.000,00		
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	3	2	89.136.100,00	2	500.000.000,00	2	525.000.000,00	3	525.000.000,00	2	551.250.000,00		
5.01.03.2.03.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				0,00		100.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		110.250.000,00		
Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	0	0	0,00	2	100.000.000,00	2	105.000.000,00	3	105.000.000,00	2	110.250.000,00		
5.01.03.2.03.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				0,00		100.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		110.250.000,00		
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	0	0	0,00	2	100.000.000,00	2	105.000.000,00	3	105.000.000,00	2	110.250.000,00		
5.01.03.2.03.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				0,00		55.000.000,00		57.750.000,00		57.750.000,00		60.637.500,00		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	0	0	0,00	2	55.000.000,00	2	57.750.000,00	3	57.750.000,00	2	60.637.500,00		
5.01.03.2.03.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan				0,00		55.000.000,00		57.750.000,00		57.750.000,00		60.637.500,00		
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)	0	0	0,00	2	55.000.000,00	2	57.750.000,00	3	57.750.000,00	2	60.637.500,00		
Meningkatnya Persentase PD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				0		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				399.999.500,00		3.700.000.000,00		3.885.000.000,00		2.630.000.000,00		2.735.000.000,00		
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				300.000.000,00		3.000.000.000,00		3.150.000.000,00		2.500.000.000,00		2.605.000.000,00		
Meningkatnya kajian yang dimanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	0	80	300.000.000,00	82	3.000.000.000,00	85	3.150.000.000,00	90	2.500.000.000,00	90	2.605.000.000,00	5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.05.02.2.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan				150.000.000,00		1.000.000.000,00		1.050.000.000,00		1.050.000.000,00		1.102.500.000,00		
Meningkatnya kualitas kajian perencanaan pembangunan di bidang sosial dan kependudukan melalui data, analisis, dan informasi yang akurat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (Dokumen)	0	1	150.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.050.000.000,00	1	1.050.000.000,00	1	1.102.500.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
5.05.02.2.02.0001 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial				150.000.000,00		500.000.000,00		525.000.000,00		525.000.000,00		551.250.000,00		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (Dokumen)	1	1	150.000.000,00	1	500.000.000,00	1	525.000.000,00	1	525.000.000,00	1	551.250.000,00		
5.05.02.2.02.0003 - Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan				0,00		500.000.000,00		525.000.000,00		525.000.000,00		551.250.000,00		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (Dokumen)	0	1	0,00	1	500.000.000,00	1	525.000.000,00	1	525.000.000,00	1	551.250.000,00		
5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan				150.000.000,00		2.000.000.000,00		2.100.000.000,00		1.450.000.000,00		1.502.500.000,00		
Meningkatnya kualitas kajian perencanaan pembangunan di bidang Ekonomi dan Pembangunan melalui data, analisis, dan informasi yang akurat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dokumen)	1	1	150.000.000,00	1	2.000.000.000,00	1	2.100.000.000,00	1	1.450.000.000,00	1	1.502.500.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (Dokumen)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
5.05.02.2.03.0001 - Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				150.000.000,00		500.000.000,00		525.000.000,00		525.000.000,00		551.250.000,00		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dokumen)	1	1	150.000.000,00	1	500.000.000,00	1	525.000.000,00	1	525.000.000,00	1	551.250.000,00		
5.05.02.2.03.0002 - Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan				0,00		500.000.000,00		525.000.000,00		525.000.000,00		551.250.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan (Dokumen)	0	1	0,00	1	500.000.000,00	1	525.000.000,00	1	525.000.000,00	1	551.250.000,00		
5.05.02.2.03.0007 - Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup				0,00		500.000.000,00		525.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (Dokumen)	0	1	0,00	1	500.000.000,00	1	525.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
5.05.02.2.03.0010 - Penelitian dan Pengembangan Perhubungan				0,00		500.000.000,00		525.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (Dokumen)	0	0	0,00	1	500.000.000,00	1	525.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH				99.999.500,00		700.000.000,00		735.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		
Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah (Persentase)	0	85	99.999.500,00	87,5	700.000.000,00	90	735.000.000,00	95	130.000.000,00	95	130.000.000,00	5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.05.03.2.02 - Invensi dan Inovasi				99.999.500,00		700.000.000,00		735.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		
Meningkatnya daya saing dan kinerja daerah melalui penerapan inovasi yang berkelanjutan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi (Laporan)	0	1	99.999.500,00	1	700.000.000,00	1	735.000.000,00	1	130.000.000,00	1	130.000.000,00		
	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
5.05.03.2.02.0004 - Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah				79.999.600,00		500.000.000,00		525.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah (Laporan)	0	1	79.999.600,00	1	500.000.000,00	1	525.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
5.05.03.2.02.0007 - Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi				19.999.900,00		200.000.000,00		210.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi (Laporan)	0	1	19.999.900,00	1	200.000.000,00	1	210.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		

Program Prioritas Nasional (PPN) adalah program pembangunan yang memiliki urgensi tinggi dan dampak luas bagi masyarakat, yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). PPN bertujuan untuk mendukung pencapaian visi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah telah menetapkan delapan misi utama yang dikenal sebagai asta cita sebagai landasan untuk mencapai visi **“Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”**

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM), Misi pertama menekankan pentingnya memperkuat pemahaman dan implementasi Pancasila sebagai ideologi negara, memperkuat sistem demokrasi, serta menjunjung tinggi HAM. Langkah ini bertujuan menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan berkeadaban;
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru. Misi kedua fokus pada peningkatan pertahanan dan keamanan nasional melalui modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan peningkatan kesejahteraan prajurit. Selain itu, pemerintah berupaya mencapai kemandirian dalam bidang pangan, energi, dan air untuk memastikan ketahanan nasional yang komprehensif.
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi. Pemerintah berkomitmen menciptakan lapangan kerja berkualitas dengan mendorong pertumbuhan industri kreatif dan melanjutkan pembangunan infrastruktur. Selain itu, pengembangan kewirausahaan ditingkatkan melalui pelatihan dan akses permodalan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas. Misi keempat menitikberatkan pada pengembangan

sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap teknologi. Pemerintah juga mendorong kesetaraan gender dengan meningkatkan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas dalam berbagai sektor pembangunan.

5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di dalam Negeri. Pemerintah berfokus pada hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi. Langkah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan. Misi keenam menekankan pembangunan yang dimulai dari desa dengan tujuan pemerataan ekonomi dan percepatan pengentasan kemiskinan. Program ini melibatkan peningkatan akses infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan di daerah pedesaan.
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan. Pemerintah berkomitmen melakukan reformasi di bidang politik, hukum, dan birokrasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, upaya pemberantasan korupsi dan narkoba akan diperkuat melalui penegakan hukum yang tegas dan kolaboratif.
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur. Misi terakhir menekankan pentingnya menjaga harmoni antara lingkungan dan budaya, serta mendorong toleransi antarumat beragama. Hal ini bertujuan menciptakan masyarakat yang inklusif, toleran, dan berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan visi misi pembangunan yang berkelanjutan, delapan Asta Cita telah ditetapkan sebagai pedoman strategis. Dari delapan Asta Cita tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota payakumbuh secara khusus

mengemban amanah Asta Cita ketujuh, yaitu “Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan” .Melalui perencanaan yang terukur, kolaborasi lintas sektor, dan pemanfaatan data yang akurat, Bappeda berkomitmen untuk mengarahkan pembangunan yang mampu mengurangi ketimpangan, meningkatkan kesejahteraan, dan memastikan seluruh lapisan masyarakat memperoleh manfaat hasil dari pembangunan daerah.

Dalam rangka mewujudkan arah pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan Bappeda Kota Payakumbuh telah menetapkan program prioritas daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran kepala daerah

TABEL 4.2
DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	MISI-3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang profesional dan kondusif
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Pengadaan Mebel	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Pelaksanaan Konsultasi Publik Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	
			Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	
			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
			Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
			Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
			Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	
3	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	
			Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
			Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
			Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	
			Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	
4.	Program Riset dan inovasi daerah	Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk	
			Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	

Sumber: Bappeda Kota Payakumbuh tahun 2025

Asta cita ketujuh dan misi ketiga kepala daerah berjalan beriringan. Melalui penguatan integritas, efektivitas birokrasi, inovasi pelayanan, dan transparansi pengelolaan sumber daya, Asta Cita ketujuh menjadi landasan filosofis yang mengarahkan implementasi misi ketiga kepala daerah dalam setiap aspek pemerintahan.

Sebagai penyelenggara urusan perencanaan, Bappeda Kota Payakumbuh memiliki peran strategis dalam memastikan arah pembangunan berjalan sesuai dengan visi, misi, dan program prioritas daerah. Meskipun Bappeda tidak secara langsung memiliki indikator kinerja kunci (IKK) dalam pelaksanaan program, Bappeda berkontribusi melalui peran koordinasi, fasilitasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan, dan melalui pelaksanaan berbagai kegiatan penelitian, serta pengembangan inovasi daerah. Penelitian dan kajian yang dilakukan meliputi sektor sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan, dengan tujuan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang relevan, aplikatif, dan mendorong efektivitas pembangunan daerah.

Melalui penyusunan dokumen perencanaan, pengintegrasian program lintas sektor, penyusunan kebijakan berbasis data, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan, Bappeda memastikan bahwa seluruh perangkat daerah bergerak selaras dalam mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan.

Tanpa mengukur kinerja melalui IKK langsung, kinerja Bappeda tercermin dari kualitas perencanaan yang disusun, sinergitas program antar perangkat daerah,

efektivitas pelaksanaan pembangunan, serta capaian indikator makro daerah yang semakin membaik dari waktu ke waktu.

Untuk mengukur capaian kinerja perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran, Bappeda menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2025-2030

Tabel 4.3
INDIKATOR KINERJA UTAMA BAPPEDA TAHUN 2025 – 2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Nilai evaluasi AKIP Komponen Perencanaan Kinerja	Nilai	25,04	26,00	26,01	26,02	26,03	26,04	26,05	
2	Indeks inovasi daerah	Nilai	54,62	54,85	55,15	55,25	55,5	55,95	56,05	
3	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Nilai	83,00	85,00	85,5	86,00	86,5	87,00	87,5	
4	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks		90,00	90,5	91,00	91,50	92,00	92,5	
5	Persentase kebijakan berbasis bukti	Persentase		86,00	87,00	88,00	90,00	92,00	93,00	

Sumber : Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2025

Tabel 4.4
INDIKATOR KINERJA KUNCI BAPPEDA TAHUN 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	NIHIL								

Sumber : Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2025

Tabel 4.5
INDIKATOR LAINNYA BAPPEDA TAHUN 2025–2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Nilai IKM	Nilai	91,00	91,50	91,70	92,00	92,50	92,70	93,00	
2	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah yang memanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah	Persentase	-	75	80	82	85	90	90	
5	Persentase fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	Persentase	-	81	85	87,50	90	95	95	

Sumber : Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2025

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2025–2029 ini merupakan wujud komitmen dalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang lebih terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Renstra ini disusun dengan mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan nasional, visi dan misi kepala daerah, serta dinamika kebutuhan pembangunan daerah yang terus berkembang.

Sebagai dokumen strategis, Renstra Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2025–2029 menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda selama periode lima tahun ke depan, serta menjadi acuan dalam mengukur capaian kinerja melalui indikator-indikator yang telah dirumuskan. Dengan Renstra ini, diharapkan seluruh program dan kegiatan Bappeda dapat berkontribusi secara nyata dalam mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang lebih maju, inklusif, dan berkelanjutan.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat bergantung pada komitmen, sinergi, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, kami membuka diri terhadap saran dan masukan konstruktif guna penyempurnaan pelaksanaan perencanaan pembangunan ke depan.

Semoga Renstra ini dapat menjadi landasan yang kuat dalam mendorong tercapainya sasaran dan tujuan pembangunan daerah, demi terwujudnya membangun Payakumbuh Maju Sehat dan Sejahtera.

KEPALA BAPPEDA KOTA PAYAKUMBUH


Dr. SYAFWAL, MM
NIP. 196901161990091001

METADATA INDIKATOR KINERJA BAPPEDA 2025-2029

NILAI EVALUASI AKIP KOMPONEN PERENCANAAN KINERJA

Nama Indikator	Nilai evaluasi AKIP Komponen Perencanaan Kinerja
Definisi	Nilai evaluasi AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) komponen perencanaan kinerja merupakan ukuran sejauh mana perencanaan kinerja instansi pemerintah telah memenuhi standar yang ditetapkan. Evaluasi ini menilai kualitas dan keselarasan perencanaan kinerja, termasuk perencanaan strategis, rencana kinerja tahunan, dan rencana aksi, dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi
Rumus Perhitungan	Nilai evaluasi AKIP komponen Perencanaan Kinerja pada dasarnya tidak memiliki rumus tunggal yang baku. Penilaian AKIP, termasuk komponen Perencanaan Kinerja, dilakukan dengan menggunakan pendekatan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Penilaian ini berfokus pada pemenuhan kriteria dan bobot yang telah ditentukan untuk setiap aspek perencanaan kinerja
Interpretasi	Interpretasi nilai evaluasi AKIP komponen Perencanaan Kinerja merujuk pada penilaian atas kualitas dan efektivitas perencanaan kinerja yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah dalam konteks AKIP. Penilaian ini mencakup berbagai aspek seperti keselarasan perencanaan, keterukuran target, dan kelengkapan dokumen perencanaan.
Sumber Data	Dokumen Perencanaan Strategis (Renstra), Dokumen Perjanjian Kinerja, Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), Dokumen Rencana Aksi, Laporan Kinerja, Hasil Evaluasi AKIP sebelumnya, Laporan Kinerja Instansi, Dokumen pendukung lainnya
Frekuensi	Tahunan

INDEKS INOVASI DAERAH (INDEKS)

Nama Indikator	Indek Inovasi Daerah (Indeks)
Definisi	Indeks Inovasi Daerah merupakan himpunan inovasi yang telah dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri sebagai bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inovasi ini didasarkan pada urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah pada setiap tingkatannya
Rumus Perhitungan	Indeks bersumber dari balitbang Kementerian Dalam Negeri setiap tahunnya
Interpretasi	Pengukuran indeks sendiri akan menggunakan 36 indikator. Setelah dilakukan pengukuran, maka akan menghasilkan ranking Indeks Inovasi Daerah di tiap klaster provinsi, kabupaten, kota, daerah tertinggal, daerah perbatasan, Papua

	dan Papua Barat
Sumber Data	Kementerian Dalam Negeri
Frekuensi	Tahunan

NILAI EVALUASI AKIP OLEH INSPEKTORAT

Nama Indikator	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat
Definisi	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat merupakan hasil penilaian yang diberikan oleh Inspektorat terhadap penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada suatu instansi
Rumus Perhitungan	Nilai evaluasi AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) oleh Inspektorat tidak memiliki rumus tunggal yang baku. Namun, evaluasi AKIP secara umum didasarkan pada penilaian terhadap berbagai komponen dan indikator yang terdapat dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Interpretasi	Nilai evaluasi AKIP yang diberikan oleh Inspektorat memiliki interpretasi yang jelas, menunjukkan tingkat akuntabilitas dan kinerja instansi. Nilai ini berkisar dari AA (Sangat Memuaskan) hingga D (Sangat Kurang), dengan setiap rentang nilai menunjukkan tingkat kinerja yang berbeda
Sumber Data	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, dan data serta informasi terkait pencapaian kinerja instansi. Inspektorat juga menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang berisi komponen, sub-komponen, dan kriteria penilaian AKIP, serta data dan informasi yang dikumpulkan untuk menganalisis dan menyusun Laporan Hasil Evaluasi (LHE)
Frekuensi	Tahunan

INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Nama Indikator	Indeks perencanaan pembangunan daerah
Definisi	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah adalah ukuran komposit yang menggambarkan kualitas dan konsistensi proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, keterpaduan, partisipatif, serta ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.
Rumus Perhitungan	$\text{Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah} = \frac{\sum_{i=1}^n (\text{Skor}_i \times \text{Bobot}_i)}{\sum_{i=1}^n \text{Bobot}_i}$ <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skor i = Nilai dari setiap aspek penilaian (0–100) • Bobot i = Bobot pentingnya aspek tersebut terhadap kualitas perencanaan • Aspek penilaian meliputi, misalnya:

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kelengkapan dokumen ➤ Konsistensi antar dokumen (RPJMD–RKPD–Renja) ➤ Keterpaduan dengan prioritas nasional ➤ Tingkat partisipasi masyarakat ➤ Penggunaan sistem informasi (SIPD) ➤ Ketepatan waktu penyusunan
Interpretasi	Semakin tinggi nilainya, semakin baik kualitas tata kelola perencanaan
Sumber Data	Bappeda (dokumen RPJMD, RKPD, Renja, Renstra)
Frekuensi	Tahunan

PERSENTASE KEBIJAKAN BERBASIS BUKTI

Nama Indikator	Persentase kebijakan berbasis bukti
Definisi	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti adalah proporsi dokumen kebijakan (peraturan, program, atau kegiatan) yang disusun berdasarkan hasil kajian, data, analisis, atau riset yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, terhadap total jumlah kebijakan yang disusun dalam satu periode tertentu, dinyatakan dalam bentuk persentase.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Kebijakan Berbasis Bukti} = \left(\frac{\text{Jumlah Kebijakan Berbasis Bukti}}{\text{Total Jumlah Kebijakan}} \right) \times 100$ <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Kebijakan Berbasis Bukti: Dokumen kebijakan (misalnya: RPJMD, RKPD, Renja, Perkada, Perda, Program, atau kegiatan) yang dilengkapi dengan justifikasi berbasis data, kajian akademik, riset, statistik, survei, atau analisis kebijakan. • Total Jumlah Kebijakan: Keseluruhan dokumen kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah pada periode tertentu (misalnya dalam satu tahun anggaran).
Interpretasi	Semakin tinggi nilainya menunjukkan semakin kuatnya penerapan prinsip evidence-based policy
Sumber Data	Bappeda (Dokumen RPJMD, RKPD, Renstra, Renja)
Frekuensi	Tahunan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Nama Indikator	Nilai IKM																									
Definisi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan program yang mendukung pelaksanaan tugas kedinasan kepala daerah (bupati/walikota) dan perangkat daerah, serta memastikan kelancaran roda pemerintahan di tingkat kabupaten/kota. Program ini mencakup berbagai kegiatan yang mendukung fungsi administrasi, keuangan, kepegawaian, dan operasional perangkat daerah																									
Rumus Perhitungan	<p>a. Penentuan bobot</p> $\text{bobot} = \frac{1}{\text{jumlah parameter}}$ <p>b. SKM</p> $\text{SKM} = \frac{\text{total nilai persepsi responden per parameter}}{\text{total parameter yang terisi}} \times \text{bobot}$ <p>c. IKM</p> $\text{IKM} = \text{SKM} \times 25$																									
Interpretasi	<p>Semakin tinggi nilai dari IKM pada suatu instansi menandakan adanya tingginya kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh instansi tersebut dan sebaliknya yang dinotasikan dengan tabel berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai Persepsi</th> <th>Nilai Interval</th> <th>Nilai Interval Konversi</th> <th>Kategori Mutu Pelayanan</th> <th>Mutu Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 - 1,75</td> <td>25,00 - 64,99</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,76 - 2,50</td> <td>65,00 - 76,60</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,51 - 3,25</td> <td>76,61 - 88,30</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,26 - 4,00</td> <td>88,31 - 100</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Kategori Mutu Pelayanan	Mutu Pelayanan	1	1,00 - 1,75	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik	2	1,76 - 2,50	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik	3	2,51 - 3,25	76,61 - 88,30	B	Baik	4	3,26 - 4,00	88,31 - 100	A	Sangat Baik
Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Kategori Mutu Pelayanan	Mutu Pelayanan																						
1	1,00 - 1,75	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik																						
2	1,76 - 2,50	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik																						
3	2,51 - 3,25	76,61 - 88,30	B	Baik																						
4	3,26 - 4,00	88,31 - 100	A	Sangat Baik																						
Sumber Data	Survei kepuasan masyarakat																									
Frekuensi	Semester dan Tahunan																									

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Nama Indikator	Meningkatnya kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Definisi	Tersedia dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang menjadi tugas dan tanggung jawab perangkat daerah secara berkala sesuai ketentuan peraturan yang berlaku
Rumus Perhitungan	$\% \text{ ketersediaan dok ren gar ev} = \frac{\text{Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang disusun PD}}{\text{semua dokumen yang harus diperbaiki PD}} \times 100\%$
Interpretasi	tersedia dokumen sebagai berikut : 1. RENSTRA

	2. RENJA 3. PERUBAHAN RENSTRA 4. PERUBAHAN RENJA 5. EVALUASI TW 1,2,3,4 6. LKJIP 7. LKPD 8. IKM 9. RKA/DPA 10. PRKA/PDPA 11. DAFTAR DATA SETIAP URUSAN YANG ADA DI APLIKASI SIPD YANG DI TETAPKAN OLEH WALIKOTA YANG DI PROSES WALIDATA 12. DOKUMEN INOVASI
Sumber Data	Perangkat Daerah
Frekuensi	Triwulan, semester dan Tahunan

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Nama Indikator	Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu
Definisi	Tersedia laporan keuangan perangkat daerah yang terdiri dari laporan harian, bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan
Rumus Perhitungan	<p>a. % adm keu harian = jumlah laporan keuangan harian yang disiapkan PD/Jumlah laporan keuangan harian yang seharusnya disiapkan) dikali 100%</p> <p>b. % adm keu bulanan = jumlah laporan keuangan bulanan yang disiapkan PD/Jumlah laporan keuangan bulanan yang seharusnya disiapkan) dikali 100%</p> <p>c. % adm keu triwulan = jumlah laporan keuangan triwulan yang disiapkan PD/Jumlah laporan keuangan triwulan yang seharusnya disiapkan) dikali 100%</p> <p>d. % adm keu semester = jumlah laporan keuangan semester yang disiapkan PD/Jumlah laporan keuangan semester yang seharusnya disiapkan) dikali 100%</p> <p>e. % adm keu tahunan = jumlah laporan keuangan tahunan yang disiapkan PD/Jumlah laporan keuangan tahunan yang seharusnya disiapkan) dikali 100%</p> <p>bobot a = 25 b = 10 c = 10 d = 20 e = 35</p>
Interpretasi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ tersedia laporan harian meliputi <ol style="list-style-type: none"> 1. Penatausahaan/Transaksi Keuangan oleh BP dan BPP 2. verifikasi SPJ ➤ Tersedia laporan bulanan meliputi <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan pembayaran gaji ASN 2. Laporan pembayaran TPP ASN 3. Laporan Pembayaran Honor pengelola keu 4. Laporan pembayaran BBM 5. Laporan pembayaran gaji outsourcing ➤ Tersedia laporan bulanan rutin lainnya

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan fungsional 2. Laporan Realisasi Anggaran 3. Laporan DTH Pajak 4. Laporan ARIP dan BPJS 5. Laporan rekonsiliasi SMART <p>➤ Tersedia Laporan triwulan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Monev perben (BKU, BP Kas Umum, Rek Koran BP dan BPP, Kartu gaji perorangan) 2. Laporan hasil Rekon LRA <p>➤ Tersedia Laporan Semester</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan keu Semester 1 2. Laporan keuangan semester 2 <p>➤ Tersedia laporan tahunan</p>
Sumber Data	Perangkat daerah
Frekuensi	Harian, bulanan, triwulanan, semester, tahunan

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Nama Indikator	Persentase penyediaan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah
Definisi	Tersedia laporan kepegawaian perangkat daerah yang terdiri dari triwulanan, semesteran, dan tahunan
Rumus Perhitungan	<ol style="list-style-type: none"> a. % adm kepegawaian bulanan = jumlah laporan kepegawaian bulanan yang disiapkan PD/Jumlah laporan Kepegawaian bulanan yang seharusnya disiapkan) dikali 100% b. % adm kepegawaian Triwulanan = jumlah laporan kepegawaian Triwulanan yang disiapkan PD/Jumlah laporan Kepegawaian Triwulanan yang seharusnya disiapkan) dikali 100% c. % adm kepegawaian Semester = jumlah laporan kepegawaian Semester yang disiapkan PD/Jumlah laporan Kepegawaian Semester yang seharusnya disiapkan) dikali 100% d. % adm kepegawaian Tahunan = jumlah laporan kepegawaian Tahunan yang disiapkan PD/Jumlah laporan Kepegawaian Tahunan yang seharusnya disiapkan) dikali 100% <p>bobot a = 25 b = 20 c = 20 d = 35</p>
Interpretasi	<p>➤ tersedia laporan bulanan meliputi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekap Absensi ASN 2. Rekap Cuti 3. Rekap DL 4. Rekap Izin, Terlambat, cepat pulang, telat pulang 5. Rekap Lembur <p>➤ Tersedia laporan Triwulan meliputi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SKP ASN 2. Rekap SKP triwulanan <p>➤ Tersedia Laporan Semester</p>

	1. Laporan keu Semester 1 2. Laporan keuangan semester 2 3. Laporan KGB per semester 4. Laporan kenaikan Pangkat 5. Laporan Bezetting ➤ Tersedia laporan tahunan 1. Rekap SKP Final 2. Sasaran SKP 3. Rekap Pajak ASN pribadi per tahun
Sumber Data	Perangkat daerah
Frekuensi	Bulanan, triwulanan, semester, tahunan

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Nama Indikator	Indeks layanan administrasi perangkat daerah																									
Definisi	Indeks layanan administrasi PD merupakan tolok ukur dari pemberian layanan kepada ASN dilingkup PD ybs kuisisioner layanan kepegawaian, keuangan, program, monev, layanan umum kantor																									
Rumus Perhitungan	a. Penentuan bobot $bobot = \frac{1}{jumlah\ parameter}$ b. SK ASN $SK\ ASN = \frac{total\ nilai\ persepsi\ responden\ per\ parameter}{total\ parameter\ yang\ terisi} \times bobot$ c. ILA PD $ILA\ PD = SK\ ASN \times 25$																									
Interpretasi	Semakin tinggi nilai dari ILA PD (indeks layanan administrasi PD pada suatu instansi menandakan tingginya kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh instansi tersebut dan sebaliknya yang dinotasikan dengan tabel berikut :																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai Persepsi</th> <th>Nilai Interval</th> <th>Nilai Interval Konversi</th> <th>Kategori Mutu Pelayanan</th> <th>Mutu Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 - 1,75</td> <td>25,00 - 64,99</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,76 - 2,50</td> <td>65,00 - 76,60</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,51 - 3,25</td> <td>76,61 - 88,30</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,26 - 4,00</td> <td>88,31 - 100</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Kategori Mutu Pelayanan	Mutu Pelayanan	1	1,00 - 1,75	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik	2	1,76 - 2,50	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik	3	2,51 - 3,25	76,61 - 88,30	B	Baik	4	3,26 - 4,00	88,31 - 100	A	Sangat Baik
Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Kategori Mutu Pelayanan	Mutu Pelayanan																						
1	1,00 - 1,75	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik																						
2	1,76 - 2,50	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik																						
3	2,51 - 3,25	76,61 - 88,30	B	Baik																						
4	3,26 - 4,00	88,31 - 100	A	Sangat Baik																						
Sumber Data	Survey kepuasan ASN																									
Frekuensi	Semester dan tahunan																									

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

Nama Indikator	Persentase ketersediaan BMD
Definisi	Guna melaksanakan tugas dan fungsi PD menyiapkan BMD untuk menunjang urusan yang diampunya

Rumus Perhitungan	Jumlah Aset yang tersedia dibagi dengan kondisi ideal
Interpretasi	Semakin tinggi persentase maka kondidi PD ideal dalam bertugas
Sumber Data	Perangkat daerah
Frekuensi	Semester, tahunan

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Nama Indikator	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah
Definisi	Kewajiban PD memenuhi kebutuhan rutin untuk pembayaran jasa kantor seperti listrik, air, telp dan jasa umum lainnya
Rumus Perhitungan	Pembayaran Rek Listrik air dan telepon selama 1 tahun
Interpretasi	Semakin tinggi persentase maka kondidi PD ideal dalam bertugas
Sumber Data	Perangkat daerah
Frekuensi	Semester, tahunan

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Nama Indikator	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik
Definisi	Kewajiban PD memelihara secara rutin atas aset yang tercatat dalam Inventaris kantor
Rumus Perhitungan	kondisi sarana dan prasarana dalam kondisi baik, sedang, rusak dibagi total aset (kondisi baik berfungsi, biaya pengelolaan masih dcairkan)dikali 100%
Interpretasi	Semakin tinggi persentase maka kondidi PD ideal dalam bertugas
Sumber Data	Perangkat daerah
Frekuensi	Semester, tahunan

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Nama Indikator	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD
Definisi	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD adalah ukuran persentase kesesuaian antara program dan kegiatan prioritas tahunan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan arah kebijakan, strategi, dan sasaran pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (\%)} = \left(\frac{\text{Jumlah Program/Kegiatan RKPD yang Selaras dengan RPJMD}}{\text{Total Program/Kegiatan RKPD}} \right) \times 100$ <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program/Kegiatan RKPD yang Selaras: Program dan kegiatan dalam RKPD yang mendukung langsung pencapaian sasaran, indikator, atau arah kebijakan RPJMD. • Total Program/Kegiatan RKPD: Seluruh program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD tahun berjalan.

Interpretasi	Semakin tinggi nilainya, semakin selaras perencanaan tahunan terhadap arah pembangunan jangka menengah
Sumber Data	Bappeda (dokumen RPJMD, RKPD)
Frekuensi	Tahunan (saat penyusunan dan penetapan RKPD)

Nama Indikator	Persentase keselarasan RPJMD dengan renstra PD
Definisi	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah (PD) adalah ukuran persentase kesesuaian antara tujuan, sasaran, indikator kinerja, dan program yang tercantum dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dengan arah kebijakan, sasaran, dan program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Rumus Perhitungan	<p>Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (%) = $\left(\frac{\text{Jumlah Komponen Renstra PD yang Selaras dengan RPJMD}}{\text{Total Komponen yang Dinilai}} \right) \times 100$</p> <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komponen Renstra PD yang Selaras: Komponen dalam dokumen Renstra PD (tujuan, sasaran, indikator, dan program) yang sesuai atau mendukung RPJMD. • Total Komponen yang Dinilai: Total keseluruhan komponen strategis dalam seluruh Renstra PD yang relevan untuk dievaluasi keselarasan terhadap RPJMD.
Interpretasi	Semakin tinggi nilainya, semakin tinggi keselarasan perencanaan strategis perangkat daerah terhadap RPJMD
Sumber Data	Dokumen RPJMD
Frekuensi	Setiap awal periode RPJMD dan saat revisi Renstra PD

Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

Nama Indikator	Persentase hasil penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan Perkada/Perda
Definisi	Ukuran tingkat ketercapaian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah disahkan melalui peraturan kepala

	daerah (Perkada) atau peraturan daerah (Perda), dibandingkan dengan jumlah seluruh dokumen perencanaan yang direncanakan untuk disusun pada periode tertentu
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah dokumen yang telah ditetapkan dengan Perkada/Perda}}{\text{Jumlah dokumen yang direncanakan disusun}} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen perencanaan pembangunan daerah mencakup RPJPD, RPJMD, RKPD, RTRW, maupun dokumen tematik/lainnya yang sesuai ketentuan. • Perkada adalah peraturan kepala daerah (Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kota) yang menetapkan dokumen perencanaan tertentu. • Perda adalah peraturan daerah yang biasanya berlaku untuk dokumen perencanaan strategis seperti RPJPD dan RPJMD. • Indikator ini menilai <i>kepatuhan proses perencanaan</i> terhadap ketentuan hukum formal, bukan hanya penyusunan secara teknis
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya (mendekati 100%), semakin menunjukkan bahwa Seluruh dokumen perencanaan yang direncanakan telah selesai disusun
Sumber Data	RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA
Frekuensi	Tahunan

Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Nama Indikator	Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan perencanaan
Definisi	Ukuran tingkat ketersediaan data dan informasi yang dibutuhkan untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, dibandingkan dengan jumlah seluruh data dan informasi yang direncanakan atau dipersyaratkan
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah data/informasi yang tersedia}}{\text{Jumlah data/informasi yang dibutuhkan}} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data dan informasi perencanaan mencakup data umum daerah, data sektoral, data spasial, data statistik, hasil kajian, indikator

	<p>pembangunan, dan informasi pendukung lain yang diperlukan sesuai ketentuan (misalnya untuk RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, dll.).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia berarti data/informasi sudah ada, terverifikasi, mutakhir, dapat diakses, dan layak digunakan untuk penyusunan perencanaan. • Indikator ini mengukur kelengkapan dan kesiapan bahan untuk mendukung proses perencanaan, bukan sekadar jumlah file yang dimiliki
Interpretasi	semakin tinggi persentasenya (mendekati 100%), semakin menandakan bahwa: Data dan informasi yang dibutuhkan telah tersedia secara lengkap sesuai kebutuhan dokumen perencanaan
Sumber Data	data umum daerah, data sektoral, data spasial, data statistik, hasil kajian, indikator pembangunan
Frekuensi	Tahunan

Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Nama Indikator	Persentase Dokumen Perencanaan dan dokumen perangkat daerah yang dikendalikan dan dievaluasi
Definisi	Ukuran tingkat keterlaksanaan kegiatan pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah maupun dokumen perencanaan perangkat daerah, dibandingkan dengan jumlah seluruh dokumen yang seharusnya dikendalikan dan dievaluasi pada periode tertentu
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah dokumen yang telah dikendalikan dan dievaluasi}}{\text{Jumlah seluruh dokumen yang wajib dikendalikan dan dievaluasi}} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen perencanaan pembangunan daerah mencakup RPJPD, RPJMD, RKPD, dan dokumen perencanaan lain yang bersifat lintas sektor. • Dokumen perencanaan perangkat daerah mencakup Renstra Perangkat Daerah, Renja, serta rencana kerja tahunan lainnya. • Dikendalikan berarti dokumen tersebut telah dipantau pelaksanaannya untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan, sasaran, dan indikator yang ditetapkan. • Dievaluasi berarti dilakukan penilaian terhadap capaian, hambatan, dan rekomendasi perbaikan untuk periode

	<p>berikutnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indikator ini menilai kepatuhan pelaksanaan fungsi monitoring dan evaluasi (monev) dalam siklus perencanaan pembangunan.
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya (mendekati 100%), berarti: Seluruh dokumen perencanaan yang diwajibkan telah dipantau pelaksanaannya (dikendalikan)
Sumber Data	RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA
Frekuensi	Tahunan

Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah

Nama Indikator	Persentase implementasi SIPD sesuai tahapan perencanaan
Definisi	Ukuran tingkat keterlaksanaan penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam seluruh tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, dibandingkan dengan tahapan yang direncanakan
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah tahapan perencanaan yang telah diimplementasikan melalui SIPD}}{\text{Jumlah seluruh tahapan perencanaan yang direncanakan}} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SIPD adalah sistem nasional yang digunakan pemerintah daerah untuk mengelola proses perencanaan, penganggaran, dan pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (diatur oleh Kemendagri). • Tahapan perencanaan meliputi proses seperti: penyusunan rancangan awal, forum konsultasi publik, musrenbang, penetapan rancangan akhir, hingga penetapan dokumen melalui Perkada/Perda. • Indikator ini menilai kepatuhan dan kelengkapan penggunaan SIPD dalam setiap tahap penyusunan perencanaan, bukan hanya keberadaan akun atau akses sistem
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya (mendekati 100%), berarti: Seluruh tahapan perencanaan (dari penyusunan rancangan awal hingga penetapan dokumen) sudah dilakukan melalui SIPD
Sumber Data	RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA
Frekuensi	Tahunan

Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah

Nama Indikator	Persentase keselarasan RKPD dengan renja PD pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia
Definisi	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia adalah ukuran tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan umum dan pembangunan manusia (seperti pendidikan, kesehatan, sosial, dan administrasi pemerintahan).
Rumus Perhitungan	<p>Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD (%) = $\left(\frac{\text{Jumlah Program/Kegiatan dalam RKPD yang Selaras dengan Renja PD}}{\text{Jumlah Total Program/Kegiatan dalam Renja PD}} \right) \times 100$</p> <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program/Kegiatan yang Selaras: Program dan kegiatan dalam RKPD yang sesuai dengan atau diadopsi dari dokumen Renja perangkat daerah pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia. • Jumlah Total Program/Kegiatan Renja PD: Seluruh program/kegiatan tahunan yang diusulkan oleh perangkat daerah yang menangani urusan bidang tersebut.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai persentase, semakin terintegrasi dan sinkron rencana kerja tahunan daerah dan perangkat daerah
Sumber Data	Dokumen RKPD
Frekuensi	Tahunan (pada masa penyusunan dan finalisasi RKPD)

Nama Indikator	Persentase keselarasan RKPD dengan renja PD pada bidang infrastruktur dan kewilayahan
Definisi	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan adalah indikator yang mengukur sejauh mana program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) telah selaras atau konsisten dengan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah (PD) yang membidangi infrastruktur dan kewilayahan, seperti pekerjaan umum, perumahan, perhubungan, dan penataan ruang.

Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Keselarasan (\%)} = \left(\frac{\text{Jumlah Program/Kegiatan RKPD yang Selaras dengan Renja PD}}{\text{Total Program/Kegiatan Renja PD}} \right) \times 100$ <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program/Kegiatan Selaras: Kegiatan/program di RKPD yang sejalan atau sama dengan kegiatan/program di Renja PD bidang infrastruktur dan kewilayahan. • Total Program/Kegiatan Renja PD: Jumlah seluruh kegiatan atau program yang diusulkan oleh perangkat daerah teknis dalam Renja.
Interpretasi	Nilai lebih tinggi menandakan keselarasan dan konsistensi perencanaan yang baik
Sumber Data	Dokumen RKPD
Frekuensi	Tahunan (saat penyusunan RKPD dan Renja)
Nama Indikator	Persentase keselarasan RKPD dengan renja PD pada bidang perekonomian dan SDA
Definisi	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam adalah indikator yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) yang membidangi sektor ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Keselarasan (\%)} = \left(\frac{\text{Jumlah Program/Kegiatan RKPD yang Selaras dengan Renja PD}}{\text{Jumlah Total Program/Kegiatan Renja PD}} \right) \times 100$ <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program/Kegiatan Selaras: Program atau kegiatan yang direncanakan dalam RKPD dan juga terdapat (atau konsisten) dalam Renja PD bidang ekonomi dan SDA. • Jumlah Total Program/Kegiatan Renja PD: Seluruh program/kegiatan yang tercantum dalam Renja perangkat daerah ekonomi dan sumber daya alam.
Interpretasi	Nilai tinggi menunjukkan tingkat sinkronisasi yang baik antar dokumen
Sumber Data	Dokumen RKPD
Frekuensi	

	Tahunan (saat penyusunan RKPD dan Renja PD)
--	---

Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Nama Indikator	Persentase hasil koordinasi pengendalian yang ditindaklanjuti bidang pemerintah dan pembangunan manusia
Definisi	Ukuran tingkat keberhasilan tindak lanjut terhadap hasil koordinasi pengendalian pelaksanaan program/kegiatan pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, dibandingkan dengan seluruh hasil koordinasi pengendalian yang dihasilkan pada periode tertentu
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah hasil koordinasi pengendalian yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah seluruh hasil koordinasi pengendalian}} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hasil koordinasi pengendalian adalah rekomendasi, arahan, atau kesepakatan yang diperoleh dari proses koordinasi pengendalian (monitoring dan evaluasi) terkait pelaksanaan program/kegiatan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia. • Ditindaklanjuti berarti rekomendasi atau hasil koordinasi tersebut telah direspons oleh pihak terkait, baik melalui perbaikan, penyesuaian, penyelesaian masalah, atau pelaksanaan langkah-langkah yang disepakati. • Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia mencakup urusan pemerintahan umum, politik, hukum, keamanan, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, dan aspek-aspek pembangunan manusia lainnya. • Indikator ini mengukur efektivitas koordinasi — bukan hanya jumlah pertemuan, tetapi sejauh mana hasilnya diimplementasikan.
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya (mendekati 100%), semakin menunjukkan bahwa Rekomendasi, arahan, atau kesepakatan hasil koordinasi pengendalian benar-benar direspons dan dilaksanakan oleh pihak terkait.
Sumber Data	Dokumen RKPD, RENJA
Frekuensi	Tahunan (saat penyusunan RKPD dan Renja PD)

Nama Indikator	Persentase PD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras bidang pemerintahan dan pembangunan manusia
Definisi	Ukuran tingkat kesesuaian dokumen perencanaan milik perangkat daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dengan prinsip kualitas, konsistensi antar-dokumen, serta keselarasan dengan dokumen perencanaan daerah yang lebih tinggi
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah PD yang memiliki dokumen perencanaan baik, konsisten, dan selaras}}{\text{Jumlah seluruh PD di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia}} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah (PD) yang dimaksud adalah OPD yang membidangi urusan pemerintahan dan pembangunan manusia (misalnya pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, pemerintahan umum). • Dokumen perencanaan meliputi Renstra Perangkat Daerah, Renja, dan dokumen rencana lain yang diwajibkan. • Baik berarti dokumen disusun sesuai peraturan, lengkap, jelas, berbasis data, dan memuat indikator kinerja yang terukur. • Konsisten berarti dokumen selaras antar-tahap (misalnya antara Renstra dan Renja) serta tidak bertentangan dengan dokumen sejenis. • Selaras berarti dokumen tersebut mendukung tujuan, sasaran, dan arah kebijakan yang ada dalam dokumen perencanaan daerah yang lebih tinggi (RPJPD, RPJMD, RKPD). • Indikator ini mengukur kualitas dan keterpaduan perencanaan di tingkat perangkat daerah dalam satu bidang urusan.
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya (mendekati 100%), berarti Sebagian besar atau seluruh PD di bidang ini sudah memiliki dokumen perencanaan yang disusun dengan baik (sesuai aturan, lengkap, berbasis data, memuat indikator terukur)
Sumber Data	Dokumen RKPD, RENJA
Frekuensi	Tahunan (saat penyusunan RKPD dan Renja PD)

Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

Nama Indikator	Persentase PD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras bidang ekonomi
Definisi	Ukuran tingkat kesesuaian dokumen perencanaan milik perangkat daerah di bidang ekonomi dengan standar kualitas, konsistensi antar-dokumen, serta keselarasan dengan dokumen perencanaan daerah yang lebih tinggi

Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah PD bidang ekonomi yang memiliki dokumen perencanaan baik, konsisten, dan selaras}}{\text{Jumlah seluruh PD di bidang ekonomi}} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah bidang ekonomi mencakup OPD yang menangani urusan perdagangan, perindustrian, pertanian, perikanan, koperasi, UMKM, pariwisata, ketenagakerjaan, investasi, dan sektor ekonomi lainnya. • Dokumen perencanaan meliputi Renstra PD, Renja, dan rencana kerja tahunan lainnya sesuai ketentuan. • Baik berarti dokumen disusun sesuai peraturan, lengkap, jelas, berbasis data, dan memuat indikator kinerja yang terukur. • Konsisten berarti isi dokumen selaras antar-tahap (misalnya antara Renstra dan Renja) dan tidak bertentangan dengan dokumen sejenis. • Selaras berarti mendukung tujuan, sasaran, dan arah kebijakan dokumen perencanaan daerah yang lebih tinggi (RPJPD, RPJMD, RKPD). • Indikator ini mengukur kualitas perencanaan dan keterpaduan antar-dokumen untuk mendukung pencapaian target pembangunan ekonomi daerah.
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya (mendekati 100%), berarti Hampir semua PD di sektor ekonomi sudah memiliki dokumen perencanaan yang berkualitas (sesuai regulasi, lengkap, berbasis data, dan memuat indikator terukur)
Sumber Data	Dokumen RKPD, RENJA
Frekuensi	Tahunan (saat penyusunan RKPD dan Renja PD)

Nama Indikator	Persentase hasil koordinasi pengendalian yang ditindaklanjuti bidang ekonomi
Definisi	Ukuran tingkat keberhasilan tindak lanjut terhadap hasil koordinasi pengendalian pelaksanaan program/kegiatan pada bidang ekonomi, dibandingkan dengan seluruh hasil koordinasi pengendalian yang dihasilkan pada periode tertentu
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah hasil koordinasi pengendalian yang ditindaklanjuti di bidang ekonomi}}{\text{Jumlah seluruh hasil koordinasi pengendalian di bidang ekonomi}} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hasil koordinasi pengendalian adalah rekomendasi, arahan, atau kesepakatan yang diperoleh dari kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) atau forum koordinasi pengendalian pelaksanaan program/kegiatan. • Bidang ekonomi mencakup urusan dan sektor pembangunan

	<p>ekonomi seperti perdagangan, perindustrian, pertanian, perikanan, pariwisata, koperasi, UMKM, investasi, dan ketenagakerjaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditindaklanjuti berarti rekomendasi atau hasil koordinasi tersebut telah direspons dengan langkah nyata, seperti perbaikan kebijakan, penyesuaian program, penyelesaian hambatan, atau implementasi kesepakatan. • Indikator ini mengukur efektivitas koordinasi pengendalian, bukan hanya jumlah rapat atau kegiatan koordinasi yang dilakukan.
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya (mendekati 100%), berarti Hampir seluruh rekomendasi, arahan, atau kesepakatan hasil koordinasi pengendalian telah direspons dan dilaksanakan oleh perangkat daerah atau pihak terkait
Sumber Data	Dokumen RKPD, RENJA
Frekuensi	Tahunan (saat penyusunan RKPD dan Renja PD)

Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Nama Indikator	Persentase hasil koordinasi pengendalian yang ditindaklanjuti bidang Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Definisi	Ukuran tingkat keberhasilan tindak lanjut terhadap hasil koordinasi pengendalian pelaksanaan program/kegiatan pada bidang infrastruktur dan kewilayahan, dibandingkan dengan seluruh hasil koordinasi pengendalian yang dihasilkan pada periode tertentu
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah hasil koordinasi pengendalian yang ditindaklanjuti di bidang infrastruktur dan kewilayahan}}{\text{Jumlah seluruh hasil koordinasi pengendalian di bidang infrastruktur dan kewilayahan}} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hasil koordinasi pengendalian adalah rekomendasi, arahan, atau kesepakatan yang diperoleh dari proses koordinasi pengendalian (monitoring dan evaluasi) terkait pelaksanaan program/kegiatan. • Bidang infrastruktur dan kewilayahan mencakup urusan pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman, perhubungan, sumber daya air, energi, lingkungan hidup, dan tata wilayah. • Ditindaklanjuti berarti rekomendasi atau hasil koordinasi tersebut telah direspons oleh pihak terkait melalui tindakan nyata, seperti penyesuaian program, penyelesaian hambatan,

	<p>atau perbaikan kebijakan.</p> <p>Indikator ini mengukur efektivitas proses koordinasi pengendalian, bukan hanya jumlah kegiatan koordinasi yang dilakukan.</p> <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hasil koordinasi pengendalian adalah rekomendasi, arahan, atau kesepakatan yang diperoleh dari proses koordinasi pengendalian (monitoring dan evaluasi) terkait pelaksanaan program/kegiatan. • Bidang infrastruktur dan kewilayahan mencakup urusan pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman, perhubungan, sumber daya air, energi, lingkungan hidup, dan tata wilayah. • Ditindaklanjuti berarti rekomendasi atau hasil koordinasi tersebut telah direspons oleh pihak terkait melalui tindakan nyata, seperti penyesuaian program, penyelesaian hambatan, atau perbaikan kebijakan. <p>Indikator ini mengukur efektivitas proses koordinasi pengendalian, bukan hanya jumlah kegiatan koordinasi yang dilakukan.</p>
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya (mendekati 100%), berarti Hampir seluruh hasil koordinasi pengendalian telah direspons dan diimplementasikan oleh perangkat daerah terkait
Sumber Data	Dokumen RKPD, RENJA
Frekuensi	Tahunan (saat penyusunan RKPD dan Renja PD)

Nama Indikator	Persentase PD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Definisi	“Persentase Perangkat Daerah (PD) yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten, dan selaras bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah PD yang memiliki dokumen perencanaan baik, konsisten, selaras}}{\text{Total PD pada bidang infrastruktur dan kewilayahan}}$
Interpretasi	Persentase tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar PD di bidang ini telah menyusun dokumen perencanaan yang terstruktur, sesuai standar, saling konsisten, dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan daerah maupun nasional. Hal ini menandakan koordinasi perencanaan berjalan baik dan

	mendukung ketercapaian sasaran pembangunan infrastruktur dan kewilayahan
Sumber Data	Dokumen RKPD, RENJA
Frekuensi	Tahunan (saat penyusunan RKPD dan Renja PD)

Penelitian dan pengembangan daerah

Nama Indikator	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah
Definisi	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti adalah proporsi dokumen kebijakan (peraturan, program, atau kegiatan) yang disusun berdasarkan hasil kajian, data, analisis, atau riset yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, terhadap total jumlah kebijakan yang disusun dalam satu periode tertentu, dinyatakan dalam bentuk persentase.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Kebijakan Berbasis Bukti} = \left(\frac{\text{Jumlah Kebijakan Berbasis Bukti}}{\text{Total Jumlah Kebijakan}} \right) \times 100$ <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Kebijakan Berbasis Bukti: Dokumen kebijakan (misalnya: RPJMD, RKPD, Renja, Perkada, Perda, Program, atau kegiatan) yang dilengkapi dengan justifikasi berbasis data, kajian akademik, riset, statistik, survei, atau analisis kebijakan. • Total Jumlah Kebijakan: Keseluruhan dokumen kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah pada periode tertentu (misalnya dalam satu tahun anggaran).
Interpretasi	Semakin tinggi nilainya menunjukkan semakin kuatnya penerapan prinsip evidence-based policy
Sumber Data	Bappeda (Dokumen RPJMD, RKPD, Renstra, Renja)
Frekuensi	Tahunan

Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan

Nama Indikator	Persentase pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial
Definisi	Ukuran yang menunjukkan proporsi kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) yang dilaksanakan pada bidang aspek-aspek sosial dibandingkan dengan total kegiatan litbang yang telah

	direncanakan pada periode tertentu.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah kegiatan litbang bidang aspek-aspek sosial yang terlaksana}}{\text{Jumlah kegiatan litbang bidang aspek-aspek sosial yang direncanakan}} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah kegiatan litbang yang terlaksana → kegiatan penelitian/pengembangan bidang sosial yang benar-benar sudah selesai dilaksanakan pada periode tertentu (misalnya 1 tahun). • Jumlah kegiatan litbang yang direncanakan → jumlah seluruh kegiatan penelitian/pengembangan bidang sosial yang tercantum dalam dokumen perencanaan tahunan (Renja, DPA, atau RKPD).
Interpretasi	Nilai tinggi (mendekati 100%) → hampir seluruh kegiatan litbang sosial yang direncanakan dapat dilaksanakan sesuai target, mencerminkan perencanaan yang realistis, dukungan sumber daya memadai, dan koordinasi pelaksanaan yang baik
Sumber Data	Bappeda (Dokumen RPJMD, RKPD, Renstra, Renja)
Frekuensi	Tahunan

Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Nama Indikator	Persentase pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang aspek-Ekonomi dan Pembangunan
Definisi	Persentase pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang aspek ekonomi dan pembangunan adalah ukuran yang menunjukkan tingkat keterlaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) yang berfokus pada isu, potensi, tantangan, serta solusi di bidang ekonomi dan pembangunan daerah dibandingkan dengan jumlah kegiatan yang telah direncanakan pada periode tertentu
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah kegiatan litbang yang terlaksana}}{\text{Jumlah seluruh kegiatan litbang yang direncanakan}} \times 100\%$ <p>keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah kegiatan litbang yang terlaksana → kegiatan yang sudah selesai atau mencapai target output sesuai rencana tahunan. • Jumlah seluruh kegiatan litbang yang direncanakan → total

	kegiatan litbang yang tercantum dalam dokumen perencanaan (Renja/Renja Litbang).
Interpretasi	Nilai Tinggi ($\geq 90\%$) → Seluruh atau hampir seluruh kegiatan litbang yang direncanakan berhasil dilaksanakan. Menunjukkan efektivitas perencanaan, dukungan anggaran yang memadai, koordinasi yang baik, serta minimnya hambatan teknis maupun administratif
Sumber Data	Bappeda (Dokumen RPJMD, RKPD, Renstra, Renja)
Frekuensi	Tahunan

Riset dan inovasi daerah

Nama Indikator	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah
Definisi	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi Terkait Riset dan Inovasi di Daerah adalah ukuran persentase dari kegiatan fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis (bimtek), dan supervisi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau instansi terkait dalam rangka penguatan kapasitas riset dan inovasi, terhadap jumlah rencana kegiatan serupa dalam periode tertentu.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Fasilitasi dan Pembinaan Riset dan Inovasi} = \left(\frac{\text{Jumlah Kegiatan Fasilitasi/Pembinaan/Bimtek/Supervisi yang Dilaksanakan}}{\text{Jumlah Kegiatan yang Direncanakan}} \right) \times 100$ <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Kegiatan Fasilitasi/Pembinaan/Bimtek/Supervisi yang Dilaksanakan Merupakan total kegiatan nyata yang telah dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait riset dan inovasi, termasuk dukungan teknis, pelatihan, pembinaan kapasitas SDM riset, dan monitoring kegiatan inovasi di daerah. • Jumlah Kegiatan yang Direncanakan Jumlah kegiatan fasilitasi, pembinaan, bimtek, dan supervisi yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan tahunan seperti Renja OPD, RKPD, atau dokumen program Litbang/Inovasi Daerah.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin optimal pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi kegiatan riset dan inovasi
Sumber Data	Laporan pelaksanaan kegiatan (SKPD terkait)
Frekuensi	Tahunan (berdasarkan siklus anggaran dan perencanaan)

Invensi dan Inovasi

Nama Indikator	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah
Definisi	<p>Indikator ini mengukur tingkat keterlibatan perangkat daerah yang mendapatkan dukungan, bantuan, atau pendampingan dari pihak berwenang (misalnya Bappeda atau unit kerja terkait) dalam proses penerapan inovasi daerah.</p> <p>Fasilitasi dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan regulasi atau pedoman • Pendampingan teknis dan konsultasi • Penyediaan sarana/prasarana pendukung • Pelatihan atau bimbingan teknis • Bantuan pembiayaan atau sumber daya lain
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah PD yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah}}{\text{Jumlah seluruh PD yang menjadi sasaran fasilitasi}} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PD yang difasilitasi → perangkat daerah yang telah menerima bantuan/pembinaan secara langsung dalam penerapan inovasi daerah pada periode tertentu. • PD sasaran fasilitasi → perangkat daerah yang direncanakan/ditargetkan mendapatkan fasilitasi inovasi.
Interpretasi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 0% → Tidak ada perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi. <input type="checkbox"/> 1% – 49% → Fasilitasi berjalan, namun sebagian besar perangkat daerah belum mendapat dukungan. <input type="checkbox"/> 50% – 79% → Mayoritas perangkat daerah telah difasilitasi, namun masih ada yang belum terjangkau. <input type="checkbox"/> 80% – 99% → Hampir semua perangkat daerah telah mendapatkan fasilitasi penerapan inovasi. <input type="checkbox"/> 100% → Seluruh perangkat daerah sasaran telah difasilitasi sesuai rencana.
Sumber Data	Laporan pelaksanaan kegiatan (SKPD terkait)
Frekuensi	Tahunan (berdasarkan siklus anggaran dan perencanaan)

MANAJEMEN RESIKO

Penetapan Konteks Resiko Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

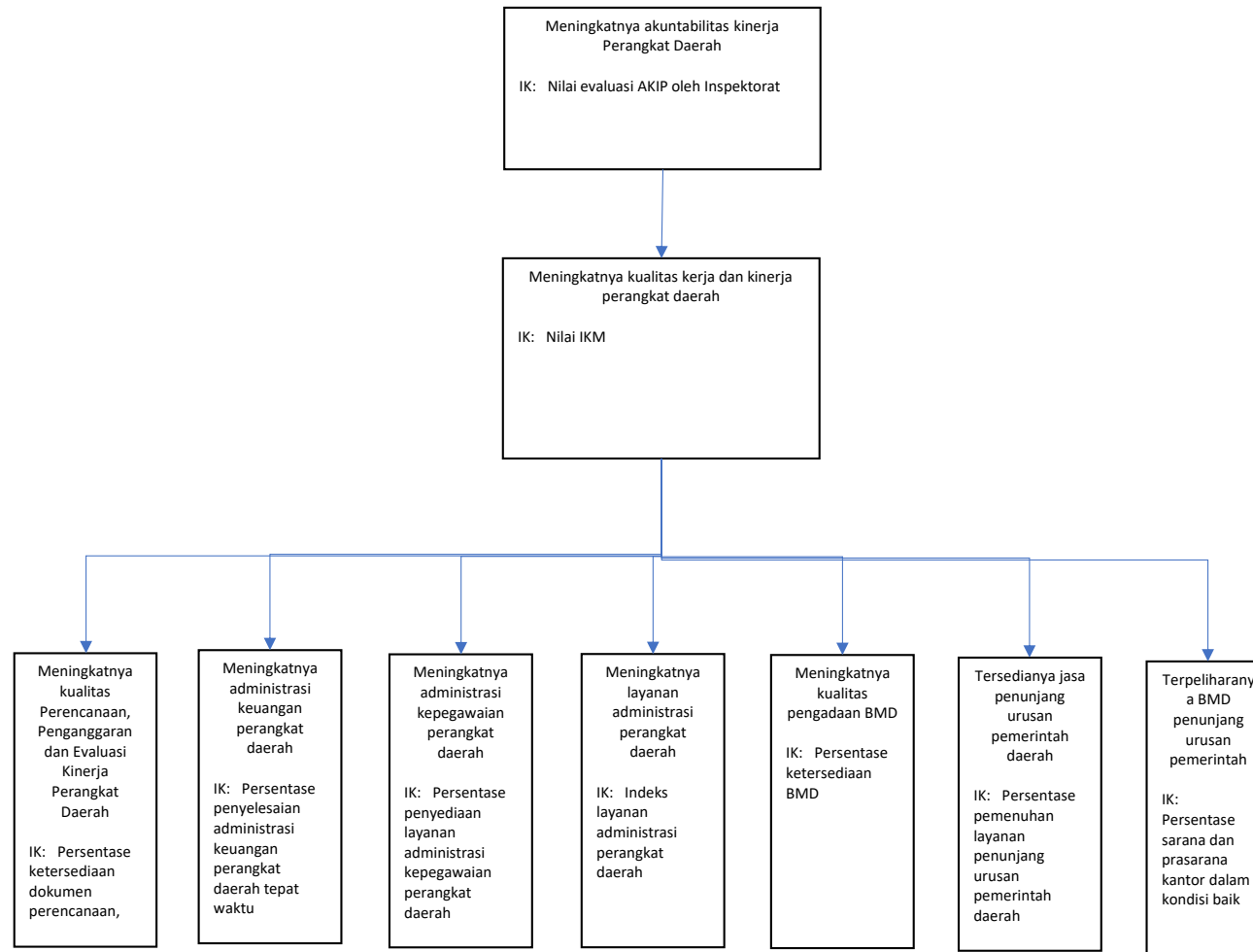
PENETAPAN KONTEKS RESIKO STRATEGIS	
MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN BERBASIS INOVASI DAN KELITBANGAN	
Nama Unit Kerja	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Periode	: Tahun 2025 - 2029
Sasaran Strategis PD	: 1.1 Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah
	: 1.2 Meningkatkan kualitas perencanaan Pembangunan daerah
	: 1.3 Meningkatkan peran riset dan inovasi dalam mendukung Pembangunan daerah
Indikator Kinerja Sasaran PD	: 1.1.a Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat
	: 1.2.a Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah
	: 1.3.a Persentase kebijakan berbasis bukti
Urusan Pemerintah Daerah	: 1. Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Bidang Urusan Perencanaan 2. Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan
Program Pembangunan	: 1.1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota 2.1 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 3.1 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 4.1 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 5.1 Program Riset dan Inovasi Daerah
Bidang Kerja Pelaksana	: 1. Sekretariat 2. Bidang Sosial dan Budaya 3. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 4. Bidang Ekonomi dan Perencanaan Makro 5. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi

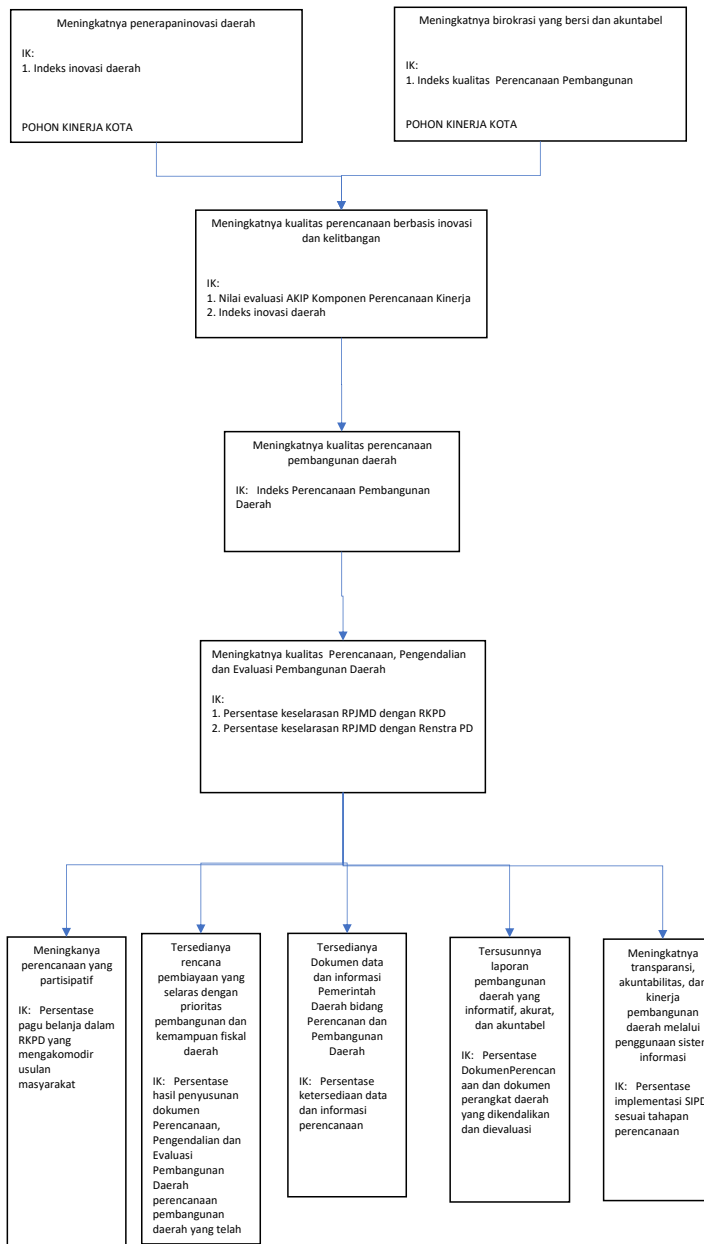
Manajemen Resiko Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RESIKO			SEBAB		C/UC	DAMPAK	
		URAIAN	KODE RESIKO	PEMILIK	URAIAN	SUMBER		URAIAN	PIHAK TERKENA
Tujuan Meningkatnya kualitas perencanaan berbasis inovasi dan kelitbangan	Nilai evaluasi AKIP Komponen Perencanaan Kinerja								
	Indeks inovasi daerah								
Sasaran 1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Menurunnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	RPP: 1.1.	Kepala Badan	Indikator kinerja yang digunakan belum sepenuhnya berbasis hasil (outcome)	Internal	C	Hasil Kinerja sulit diukur secara nyata	Pemerintah, Masyarakat
					lemahnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal yang mengakibatkan data capaian tidak selalu akurat dan terkini	Internal	C	Tidak ada gambaran jelas apakah tujuan strategis tercapai atau hanya sekadar melaksanakan kegiatan	PD
					koordinasi internal belum maksimal	Internal	C	Program dan kegiatan antar bidang berjalan sendiri-sendiri sehingga sasaran	Perangkat Daerah

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RESIKO			SEBAB		C/UC	DAMPAK	
		URAIAN	KODE RESIKO	PEMILIK	URAIAN	SUMBER		URAIAN	PIHAK TERKENA
								bersama sulit tercapai	
Sasaran 1.2 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Menurunnya kualitas perencanaan Pembangunan daerah	RPP: 1.2	Kepala Badan	Tidak sinkronkan dokumen perencanaan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA	Eksternal	C	Arah pembangunan menjadi tidak konsisten	Pemerintah Daerah
					Perubahan regulasi propinsi dan Pusat	Eksternal	C	Penundaan atau perubahan prioritas program	Pemerintah
					hasil pengendalian dan evaluasi capaian kinerja pembangunan tidak sesuai dengan target yang telah di tetapkan	Internal	C	Penambahan beban kerja untuk tajun berikutnya	Perangkat Daerah
					Belum optimalnya hasil evaluasi capaian kinerja menjadi dasar/pertimbangan perencanaan tahun berikutnya	Internal	C	Perencanaan tahun berikutnya menjadi lemah	Perangkat Daerah

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RESIKO			SEBAB		C/UC	DAMPAK	
		URAIAN	KODE RESIKO	PEMILIK	URAIAN	SUMBER		URAIAN	PIHAK TERKENA
					Koordinasi lintas perangkat daerah yang lemah	Internal	C	Tidak selarasnya antara perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan	Pemerintah
Sasaran 1.3 Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Persentase kebijakan berbasis bukti	Rendahnya kebijakan berbasis bukti	RPP: 1.3	Kepala Badan	Data sektoral tidak lengkap, tidak mutakhir dan tidak terintegrasi dalam satu sistem informasi	Internal	C	Program dan kegiatan disusun berdasarkan data yang tidak mencerminkan kondisi terkini, sehingga solusi yang diambil kurang tepat sasaran	Perangkat Daerah, Pemerintah, Masyarakat
					Penyesuaian dokumen perencanaan dilakukan tergesa-gesa tanpa analisis berbasis data yang memadai	Internal	C	Program dan kegiatan tidak tepat sasaran	Perangkat Daerah





1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia
 2. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan
 3. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA
- IK:
1. Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 2. Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
 3. Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA

Meningkatnya hasil koordinasi pengendalian dan ditindaklanjuti bidang pemerintahan dan pembangunan manusia

IK: Persentase hasil koordinasi pengendalian yang ditindaklanjuti bidang pemerintah dan pembangunan manusia

Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan lingkup bidang pemerintah dan pembangunan manusia

IK: Persentase PD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras bidang pemerintah dan pembangunan manusia

Meningkatnya hasil koordinasi pengendalian dan ditindaklanjuti Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

IK: Persentase hasil koordinasi pengendalian yang ditindaklanjuti bidang Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

IK: Persentase PD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Meningkatnya hasil koordinasi pengendalian dan ditindaklanjuti bidang perekonomian dan SDA

IK: Persentase hasil koordinasi pengendalian yang ditindaklanjuti bidang ekonomi

Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan lingkup bidang perekonomian dan SDA

IK: Persentase PD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras bidang ekonomi

